



ASYIKpublisher



Catatan Harian **1**

*Ahmad Syaikh*

[OKTOBER - DESEMBER 2019]

Catatan Harian 1  
*Ahmad Syaikh*

[OKTOBER - DESEMBER 2019]

**Penulis:**

Ahmad Syaikh

**Editor:**

Erwyn Kurniawan

**Cetakan Ke-I**

Desember 2019

**Diterbitkan oleh:**

Asyikpublisher

**Percetakan:**

Asyikpublisher



Politik bukan sekadar kekuasaan. Siapa dapat apa dan bagaimana cara meraihnya. Politik juga khidmat, melayani rakyat sepenuh hati tanpa pamrih.

– Ahmad Syaikh –

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Pengantar Penulis.....	vii
Semoga Amanah Ini Tak Salah Memilih Pundak .....	1
Batik dan Ikhtiar Menjaga Identitas Bangsa.....	4
Anggota DPR di Era 4.0: Tiada Waktu Berleha-Leha .....	6
Merah Putih: Di Kepala, Jiwa dan Tindakan .....	9
Integrasi TNI dengan Nilai Islam.....	13
Nasihat Sahabat.....	17
Ya Allah, Teruslah Berikan Kami Kesempatan Bertakziah.....	20
Duka Mereka, Duka Kita Semua .....	23
Belajar Dari Kang Agis.....	26
Beramal dan Berkemajuan: Inspirasi dari Muhammadiyah.....	29
Karena Anak Muda Agen Perubahan.....	32
Dari Menjenguk Orang Sakit, Kita Belajar Banyak Hal.....	35
Memantaskan Demokrasi .....	38
Santri: Dulu, Kini dan Esok.....	41
Bercermin kepada Sayyidina Umar bin Khatthab .....	47
Bike To Work: Bergerak dan Siap Bekerja .....	51
Amanah Baru: Menjadi Wakil Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) .....	53
Sebait Sumpah Agar Indonesia Tak Lekang .....	56
Satu Hari Penuh di Dapil: Impian Wujudkan Desa Binaan .....	59
Rapat di DPR dan Mengenang Alm. Ust. Arifin Ilham.....	62
BAKN dan Muroqobatullah .....	65
Memperjuangkan Aspirasi Keluarga Korban Pesawat Lion Air JT 610.....	72
Kunjungan Kerja ke Pemprov Aceh.....	76
Terima Kasih Guru .....	79
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Karawang.....	81
Korupsi Musuh Kita Bersama .....	83
Perlukah Haluan Negara Dihidupkan?.....	86
Gowes Asyik Sabilulungan: Satu Sepeda Sejuta Sahabat .....	89
Menyerap Aspirasi Masyarakat Terkait Penataan Kelembagaan MPR .....	92
Dilema Kartu Sehat di Kota Bekasi .....	95
Rilis Media.....	99

# Kata Pengantar

*Assalaamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.*

Saya tak pernah lelah mensyiarkan Visi PKS di Parlemen yaitu menjadi yang terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang berkarakter, maju, adil dan sejahtera. Untuk itu Fraksi PKS DPR menetapkan garis perjuangan bagi setiap anggotanya, harus pro-rakyat (berpihak pada kepentingan rakyat), pro-umat (menjaga hak beragama umat beragama apapun), dan pro-pengokohan nasionalisme Indonesia (menjaga karakter dan identitas bangsa)

Dengan seluruh amanah tersebut, para anggota Fraksi PKS harus tampil kreatif, inovatif, dan atraktif. Tentunya, tetap dengan mengedepankan substansi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Kerja-kerja kita di parlemen harus cepat, cerdas, dan terarah agar anggota dewan PKS selalu terdepan. Maksud dari terdepan adalah orang baru berpikir kita sudah melakukan, giliran orang melakukan kita sudah beralih melakukan hal lain yang lebih inovatif. Itulah ciri khas Fraksi PKS DPR RI.

Fraksi PKS juga berkomitmen untuk lebih aktif menjangkau aspirasi rakyat melalui forum terbuka atau penerimaan aspirasi yang semakin intensif setiap pekan. Jika periode lalu kita buka Hari Aspirasi Rakyat setiap minggu, maka periode sekarang menjadi dua hari setiap hari Selasa dan Jum'at.

Pada titik inilah, hadirnya buku yang ditulis Ustadz Ahmad Syaikh ini menjadi sangat penting. Sebab isi buku beliau mengkonfirmasi kerja-kerja nyata kita selama menjadi Anggota DPR, sesuai visi dan misi kita di Parlemen.

Saya bangga dan mengapresiasi Ustadz Ahmad Syaikh yang dengan cepat mampu memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Semoga buku ini akan menjadi bukti bahwa kita bersama rakyat. Sebab, yang terucap akan menguap dan yang ditorehkan dalam tulisan akan kekal abadi.

*Wassalaamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.*

Jakarta, 16 Desember 2019

**Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A**

Ketua Fraksi PKS DPR RI 2019-2024

## Pengantar Penulis

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**A**lhamdulillah. Ini kata pertama yang wajib saya ucapkan seiring dengan terbitnya buku ini. Semua berkat Allah SWT, Zat Yang Maha Kuasa, yang memberikan saya kekuatan untuk bisa menuliskannya.

Buku ini hadir sebagai bentuk tanggungjawab moral (moral obligation) saya sebagai Anggota DPR RI. Sebab, keberadaan saya sebagai Wakil Rakyat adalah amanah berat yang diberikan masyarakat.

Pekan ke pekan. Hari ke hari. Menit ke menit. Hingga detik ke detik saya harus menjalankannya. Berkunjung ke dapil. Menemui konstituen. Mendengar dan menyerap aspirasi mereka. Juga rapat dengan pihak pemerintah. Menyampaikan saran dan aspirasi, serta kritikan yang bersifat membangun. Hampir tiga bulan saya melakoni ini.

Untuk diketahui, selain sebagai Anggota Komisi V, saya juga diamanahi menjadi Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan di Badan Pengkajian MPR. Cukup banyak agenda aktivitas, insya Allah semuanya saya niatkan dan tujukan untuk kemaslahatan.

Ada satu peristiwa yang mengharukan. Yakni saat saya menerima audiensi keluarga korban pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di Perairan Karawang, Jawa Barat. Mereka datang ke Fraksi PKS dan saya yang menerima langsung. Mereka meminta bertemu usai membaca pernyataan saya di media terkait tragedi kecelakaan pesawat Lion Air tersebut.

Mereka menangis. Menyampaikan segala unek-uneknya. Saya pun ikut merasakan kesedihan mereka. Lalu, apa yang mereka sampaikan, saya teruskan kepada pihak-pihak terkait saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Peristiwa ini semakin menyadarkan saya, betapa tak mudahnya menjadi Wakil Rakyat. Ada begitu banyak harapan. Dan itu harus diperjuangkan oleh anggota dewan. Disinilah ada tanggungjawab moral yang besar dari Wakil Rakyat kepada masyarakat.

Pada titik inilah, buku ini saya hadirkan. Setidaknya, melalui buku sederhana ini, masyarakat dapat melihat apa saja yang telah dilakukan. Agar publik dapat menilai kinerja saya sebagai wakil mereka di parlemen. Sebab mereka berhak tahu dan mengkritisi apa yang saya kerjakan.

Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menerbitkan buku ini. Kepada Pimpinan DPP PKS, Pimpinan Fraksi PKS MPR dan DPR, juga kepada kader dan simpatisan.

Semoga buku ini bermanfaat, dan dapat terus memacu saya untuk berbuat optimal memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Aamiin.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Bekasi, 17 Desember 2019

**Ahmad Syaikhu**



## Semoga Amanah Ini Tak Salah Memilih Pundak



Sosok Khalifah Abu Bakar terlintas di benak saya hari ini, saat pelantikan saya menjadi anggota DPR. Pidatonya yang melegenda lambat-lambat saya ingat.

"Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik diantara kalian semuanya, untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku."

Abu Bakar melanjutkan pidatonya:

"Sifat jujur itu adalah amanah, sedangkan kebohongan itu adalah pengkhianatan. Orang lemah di antara kalian aku pandang kuat posisinya di sisiku dan aku akan melindungi hak-haknya. 'Orang kuat' di antara kalian aku pandang lemah posisinya di sisiku dan aku akan mengambil hak-hak mereka yang mereka peroleh dengan jalan yang jahat untuk aku kembalikan kepada yang berhak menerimanya."

Beliau meneruskan pesan-pesannya:

"Janganlah diantara kalian meninggalkan jihad, sebab kaum yang meninggalkan jihad akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Patuhlah kalian kepadaku



selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mematumiku. Kini marilah kita menunaikan Shalat semoga Allah Subhanahu Wata'ala melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua."

Ya, jabatan bukanlah anugerah. Ini adalah ujian dan tak semua orang mampu menjalaninya dengan baik. Ada yang gagal, ada yang berhasil.

Amanah menjadi Wakil Rakyat hari-hari ini sungguh tak mudah. Sebab negeri ini tengah bergejolak. Kerusakan di Wamena. Musibah di berbagai tempat. Aksi mahasiswa dimana-mana, termasuk di depan Gedung DPR, tempat saya berkantor.

Ada angin perubahan yang sedang bertiup kencang. Sebagai anggota DPR, saya dan rekan-rekan harus mampu menangkapnya.

Doakan saya. Agar amanah berat ini tak salah memilih pundak. ☺



## Batik dan Ikhtiar Menjaga Identitas Bangsa

**S**iapa yang tak kenal batik? Bahkan bukan cuma mengenang, saya yakin setiap orang Indonesia pasti memiliki batik dan memakainya.

Batik mempunyai sejarah panjang. Bermula sebagai pakaian keraton, lalu akhirnya meluas dipakai masyarakat. Kerajaan Majapahit jadi tempat awalnya.

Sejarah Hari Batik Nasional tak lepas ketika batik diakui pada saat sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah

tentang Warisan Budaya Tak-benda yang diselenggarakan UNESCO di Abu Dhabi, 10 tahun lalu, 2 Oktober 2009.

Agenda yang diselenggarakan UNESCO ini mengakui batik, wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia oleh UNESCO (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity).

Pengakuan dari UNESCO itulah yang jadi alasan masyarakat Indonesia menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.

Bagi saya, batik tak sekadar pakaian. Batik adalah identitas kita sebagai bangsa. Dan peringatan Hari Batik Nasional datang pada saat yang tepat. Mengapa?

Belakangan ini identitas-identitas kita sebagai bangsa mulai terkikis. Kita dikenal sebagai bangsa yang ramah, santun, murah senyum. Mengedepankan toleransi, mencintai kerukunan. Tapi semua itu seakan sirna akhir-akhir ini.

Kerusuhan merebak dimana-mana. Konflik tak berkesudahan. Kekerasan tersaji hampir setiap hari. Negeri ini gaduh.

Saya berharap, momentum Hari Batik Nasional ini mengingatkan semua pihak akan identitas asli kita sebagai bangsa besar. Kita kembali kepada jatidiri. Tinggalkan kekerasan dan kemarahan. Mari Kita rajut lagi baju kebangsaan kita.

Selamat Hari Batik Nasional. 🍃

## Anggota DPR di Era 4.0: Tiada Waktu Berleha-Leha



Sejak sebat sumpah sebagai Anggota DPR terucap dari lisan, Selasa, 1 Oktober lalu, roda waktu terasa bergulir begitu cepat. Detik ke detik, menit ke menit, dan jam ke jam sarat dengan aktivitas kedewanan. Tiada waktu berleha-leha.

Berbagai macam rapat dihelat. Agendanya beraneka rupa. Dari pagi hingga larut malam.

Seluruh anggota Fraksi PKS sibuk. Terlibat dalam semua agenda rapat, termasuk saya. Ketua Fraksi PKS Ustadz Jazuli Juwaini memaparkan visi dan misi fraksi. Juga menyampaikan capaian-capaian yang sudah berhasil dilakukan pada periode sebelumnya.

Visi Fraksi PKS adalah "Terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter, bermartabat, adil dan sejahtera."

Ustadz Jazuli meminta kami untuk lebih memahami visi tersebut. Beliau juga meminta F-PKS harus lebih maju dari fraksi lainnya. Saat fraksi lain masih berfikir, kita sudah berbuat.

Di masa 2014-2019, F-PKS melakukan banyak terobosan. Di antaranya mewujudkan Hari Aspirasi yang dilakukan setiap Selasa, Lomba Kitab Kuning, Lomba Membaca Teks Proklamasi Mirip Bung Karno, dan memperingati Mosi Integral Mohammad Nasir. F-PKS juga mengusulkan Kasman Singodimeja (Ketua Parlemen pertama di Republik Indonesia) untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Visi, Misi dan capaian yang sudah ada menurut saya merupakan cerminan dari wajah anggota dewan di era 4.0. Di masa ini, saat terjadi gelombang dahsyat perubahan teknologi dan budaya komunikasi, keberadaan anggota DPR bagai ikan di akuarium. Terlihat jelas setiap gerak-geriknya oleh masyarakat.



**Visi Fraksi PKS adalah  
"Terdepan dalam memper-  
juangkan kepentingan  
rakyat untuk mewujudkan  
Indonesia yang berkarakter,  
bermartabat, adil dan  
sejahtera."**

Publik akan mengetahui mana fraksi dan anggota dewan yang tak berpihak pada rakyat dan mana yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Mereka juga akan melihat secara kasat mata, siapa yang serius bersidang dan siapa yang tertidur lelap.

Doakan agar saya dan seluruh anggota Fraksi F-PKS mampu menjalankan visi dan misi mulia di atas. Sehingga kami layak disebut sebagai 'Penyambung Lidah Rakyat'. 🇮🇩

## Merah Putih: Di Kepala, Jiwa dan Tindakan

Tadi malam, Kamis (3/10) saya menjadi saksi terpilihnya Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024. Berakhir dengan aklamasi. Bukan voting.

Yang menarik dari proses tersebut adalah ketika kita semua yang hadir sepakat untuk menggunakan jalan musyawarah mufakat. Tanpa pemungutan suara. Berbeda dengan pemilihan-pemilihan pucuk pimpinan MPR sebelumnya.



Malam tadi secara sempurna pengejawantahan sila keempat Pancasila terlihat. Mengedepankan hikmah kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan penting bagi bangsa dan negara.

Saya membayangkan jika sila-sila lainnya juga demikian. Dipraktikkan dalam kehidupan. Bukan sekadar jargon atau slogan lips service.

Jika Sila Pertama dilaksanakan, maka tak akan ada lagi upaya-upaya menjadikan negeri ini tak bertuhan dan tak beragama. Produk UU yang dihasilkan pun selalu mengacu pada nilai-nilai agama. Tidak liberal dan sekuler.

Jika Sila Kedua dilaksanakan, tiada lagi sikap dan perilaku Para Pemangku Jabatan yang berlawanan dengan kemanusiaan. Tak ada kekerasan. Mengedepankan pendekatan persuasif. Agar lahir rasa adil dan beradab.

Jika Sila Ketiga dilaksanakan, tak akan ada pembiaran terhadap upaya adu domba, memecah belah bangsa. Konflik horisontal dihindarkan. Kerusuhan beraroma suku, ras, golongan, kelompok dan agama tak terjadi.

Jika Sila Kelima dilaksanakan, maka hukum akan berkeadilan. Tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tiada diskriminasi. *„Equality before the law.“*

Dua hari lalu, saya dan rekan-rekan Fraksi PKS memakai ikat kepala Merah Putih. Sebagai sebuah simbol bahwa kami cinta NKRI. Bermakna pula bahwa kami menjadikan



**Ulama dan umat memang menjadi backbone atau tulang punggung perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.**

Merah Putih sebagai panduan ide atau gagasan kami, menghujam pada jiwa dan terlihat dalam tindakan.

Insy Allah kami bisa melakoninya. Bukan semata-mata pencitraan dan janji. Sebab, PKS sebagai partai Islam memiliki tarikan nafas yang sama dengan Pancasila.

Saya teringat dengan Mohamad Natsir. Dengan nada retorik beliau bertanya saat berpidato pada acara Nuzulul Qur'an di Istana Negara, Mei 1973. Tanya Natsir:

Bagaimana mungkin ajaran al-Qur'an yang memancarkan tauhid dapat apriori (bertentangan) dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa?

Bagaimana mungkin ajaran al-Qur'an yang ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan 'ijtima'iyah bisa apriori (bertentangan) dengan keadilan sosial?

Bagaimana mungkin ajaran al-Qur'an yang justru memberantas feodal dan pemerintahan sewenang-wenang, serta meletakkan dasar musyawarah dalam susunan

pemerintahan, dapat apriori (bertentangan) dengan apa yang dinamakan Kedaulatan Rakyat?

Bagaimana mungkin ajaran al-Qur'an yang menegakkan istilah *islahu bainan naas* sebagai dasar-dasar pokok yang harus ditegakkan umat Islam, dapat apriori (bertentangan) dengan apa yang disebut Perikemanusiaan?

Bagaimana mungkin ajaran al-Qur'an yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan, dapat apriori (bertentangan) dengan Kebangsaan?

Bapak Mosi Integral itu benar. Tak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Karena itu, saya sangat yakin dan percaya diri, Merah Putih tak akan hanya jadi hiasan di kepala, tapi juga menghujam ke dalam jiwa dan tindakan.

Aamiin. 🙏

## Integrasi TNI dengan Nilai Islam



Sebuah dialog tak biasa terjadi antara Panglima Besar Jenderal Sudirman dan seorang prajuritnya. Percakapan tersebut sebab keheranan melihat sepak terjang Sang Panglima yang kerap lolos dari serangan Tentara Penjajah Belanda.

“Pak Kyai (sebutan akrab para prajurit kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman), mengapa selalu berhasil lolos dari kepungan Tentara Belanda. Apa rahasianya?” Tanya Si Prajurit.

Lalu Panglima Besar Jenderal Sudirman memberi jawabannya.

"Ada tiga sebab. Pertama karena saya selalu dalam keadaan bersuci atau wudhu. Kedua, sholat di awal waktu. Ketiga, semua yang saya lakukan untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Apa pelajaran penting dari dialog ini? Bagi saya, ini bukti bahwa TNI memiliki akar sejarah yang bertautan dengan nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam.

Pada faktanya memang demikian adanya. Jika kita melihat cermin sejarah, kelahiran TNI tak dapat dilepaskan dengan ulama dan Islam. TNI dan Islam berkelindan. Bertautan satu sama lain.

Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menuturkan. Dia mengaku heran sering mendapatkan pertanyaan ihwal kedekatannya dengan umat Islam.

"Sejarah TNI memang begitu. Tentara asal-usulnya dari umat Islam," katanya dalam acara Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah: Islam, TNI, dan Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Beliau bercerita asal usul TNI. Katanya, TNI bermula dari tiga kesatuan militer yang didirikan oleh kaum santri pada 1943 yakni Divisi Mujahiddin, Hizbullah, dan Sabilillah. Setelah kemerdekaan, laskar-laskar ini melebur bersama elemen lain mendirikan Badan Keamanan Rakyat, sebagai cikal bakal TNI.

Menurut Gatot, perjuangan mereka semakin kuat sete-

lah keluarnya fatwa jihad dari kiai. Elan 'Merdeka atau Mati' ini terlihat ketika berlangsung Perang 10 Nopember 1945 di Surabaya yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Gatot juga mengungkapkan hal lain. Pemimpin pertama TNI Jenderal Soedirman juga bekas Komandan Hizbul Wathon dan guru Muhammadiyah. Setelah kemerdekaan, sebagian bekas pejuang itu melanjutkan karir kemiliteran, sisanya kembali menjadi orang sipil.

"TNI sadar betul, tak bisa dipisahkan TNI dan umat Islam," ujarnya.

Fakta sejarah ini benar adanya. Ulama dan umat memang menjadi *backbone* atau tulang punggung perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Peran mereka sangat vital dan strategis.

Dan itu pula yang dilakukan oleh Jepang di negeri ini. Negeri Matahari Terbit itu mendirikan Tentara Pembela Tanah Air atau Peta.

"Tindakan Balatentara Djepang ini, mengakui Ulama dan umat Islam sebagai *powerful forces* --kekuatan bangsa yang luar biasa besarnya." (Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2, hlm 64). Ini terbukti efektif dengan Jepang membentuk Peta, sekutu tidak berani memasuki Indonesia langsung dari Australia.

Kesadaran sejarah semacam ini harus dimiliki oleh kita. Sebab, usaha untuk memisahkan TNI bahkan memperten-

tangkannya dengan Islam selalu saja hadir. Ini berbahaya karena dapat mengancam keutuhan bangsa.

Hari ini, TNI memperingati kelahirannya yang ke-74 tahun. Temanya: TNI Profesional Kebanggaan Rakyat.

Bukankah ini tepat dengan jawaban Panglima Besar Jenderal Sudirman saat ditanya prajuritnya. Perhatikan baik-baik. Alasan ketiga disebut 'Karena semua yang saya lakukan untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.'

Ini cerminan profesionalitas seorang prajurit TNI. Dedikasi, loyalitas dan komitmennya sebagai seorang prajurit TNI hanya satu: untuk bangsa dan negara.

Dan menariknya, sebelum itu, Panglima Besar memberikan jawaban tentang dirinya yang selalu dalam keadaan suci dan sholat awal waktu. Pesannya, untuk menjadi profesional maka seorang prajurit TNI harus menjadikan agama (Islam) sebagai landasan dan ruh perjuangan.

Karena itu, saya sepakat dan berbahagia dengan tema HUT ke-74 TNI ini. Menjadi prajurit profesional yang cinta NKRI harus berlandaskan pada agama, dalam konteks ini yaitu Islam.

Sebab TNI dan Islam satu kesatuan. Berkaca pada sejarah, keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Dirgahayu ke-74 TNI, Jadilah TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. 🍀



## Nasihat Sahabat

Seorang sahabat mengirim pesan via WhatsApp usai pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober silam. Isinya sarat nasihat dan untaian doa.

"Barakallahu fik Ustadz. Semoga semakin amanah dalam memikul beban sebagai wakil rakyat. Semoga semakin dicintai publik karena kerja pelayanan dan pembelaannya. Semoga semakin tawadhu atas semua capaian ini dengan rasa kesyukuran kepada-Nya. Sehingga seluruh aktivitas bernilai ibadah dan memperoleh keberkahanNya. Aamiin



**Sebab begitulah seharusnya seorang sahabat bersikap. Tak cuma pandai memuji, tapi yang lebih penting adalah mengingatkan.**

YRA. Buat dakwah ini terus berkembang. Buat struktur dan kader terus bangga. Buat pemilih semakin percaya. Buat bangsa ini lebih baik. Terus berkhidmat untuk rakyat."

Pesan-pesan senada saya terima. Dari berbagai daerah. Tak cuma melalui WhatsApp, tapi juga kanal media sosial lainnya seperti Instagram, twitter dan Facebook.

Sungguh, saya sangat bersyukur dengan hal ini. Mereka tulus mendoakan. Juga memberikan nasihat, bahkan kritik. Semuanya tentu untuk perbaikan ke depan.

Mudah-mudahan inilah yang akan menghindarkan seseorang dari kerugian. Sebagaimana yang diingatkan Allah dalam surat Al-Asr 1-3:

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."

Nasihat sangat penting. Nabi SAW bersabda, "Agama adalah nasihat."

Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?"

Nabi menjawab, "Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan untuk seluruh umat Islam." (HR Muslim dan Nasai).

Salah satu nasihat seperti yang disebutkan dalam hadis di atas adalah nasihat untuk pemimpin. *Wa li-aimmatil muslimin*. Ini tanda bahwa memberikan nasihat kepada pemimpin untuk kemaslahatan umat termasuk amalan yang mulia, bahkan termasuk kategori jihad fi sabilillah (HR Ahmad).

Imam Nawawi menjelaskan, ketika kita memberikan nasihat kepada pemimpin, itu artinya menolong pemimpin dalam menjalankan kebenaran, mentaatinya dalam kebaikan, mengingatkannya dengan lemah lembut atas kesalahan yang diperbuat, mengingatkan kelalaiannya atas hak kaum Muslimin, dan membantunya dalam menciptakan stabilitas negara.

Terima kasih para sahabat yang telah memberikan nasihat-nasihat terbaiknya kepada saya. Sebab begitulah seharusnya seorang sahabat bersikap. Tak cuma pandai memuji, tapi yang lebih penting adalah mengingatkan.

Semoga kita bisa istiqomah dalam meniti jalan kehidupan ini. Amin ya Rabbal 'alamin. 🌱

## Ya Allah, Teruslah Berikan Kami Kesempatan Bertakziah...



**H**ari ini saya kembali melakukan takziah. Pekan lalu, agenda serupa juga saya jalankan. Jarak waktu yang teramat dekat.

Saya kemudian teringat dengan kisah Ibnu Umar RA. Suatu hari dia menemui Nabi Akhir Zaman itu.

"Aku datang menemui Nabi Muhammad SAW bersama 10 orang, lalu salah seorang Anshar bertanya, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia wahai

Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya, mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan." (HR Ibnu Majah)

Tepat sekali apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Mengingat kematian adalah cara paling ampuh untuk menyadarkan manusia. Bahwa sejatinya hidup ini tidak lama. Bahwa semua yang bernyawa pasti akan tiada. Bahwa dunia ini hanya sementara. Senda gurau atau permainan belaka.

Manusia yang mengingat kematian tidak akan memanjangkan angan-angannya dan gemar berbuat kebajikan. Dia menyadari bahwa setiap manusia, baik kaya atau miskin, mempunyai jabatan tinggi atau rendah, pintar atau bodoh, dan fisik sempurna atau cacat, semuanya akan kembali menyatu dengan tanah. Sendiri dalam kegelapan menghadapi malaikat maut.

Allah SWT telah mengingatkan kita dalam Surat Al Jumu'ah (62) ayat 8, "Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."

Sebagai wakil rakyat, agenda takziah jadi momentum paling berharga bagi saya. Sebab pada saat-saat seperti inilah saya menyadari begitu lemahnya diri ini. Tak ada yang dapat disombongkan.

Ketika berada di depan jenazah, Allah SWT seperti menegur saya. Apa yang hendak engkau banggakan? Apa yang akan engkau bawa? Pin emas DPR engkau tak ada gunanya. Jas dan dasi engkau berganti kain kafan. No Keanggotaan DPR engkau tak berlaku.

Membayangkan daftar pertanyaan tersebut membuat saya jadi berhati-hati dalam mengemban amanah berat ini. Jika jabatan dan kekuasaan yang Allah SWT titipkan kepada saya tak bermanfaat bagi masyarakat luas, betapa zalimnya diri ini. Dan tak mampu saya menerka bagaimana murkanya Allah SWT.

Takziah membuat saya sadar, bahwa amanah ini harus membawa kemaslahatan buat umat. Juga bangsa dan negara. Bukan sebaliknya, digunakan untuk korupsi, kolusi dan sok kuasa.

Ya Allah, teruslah berikan kami kesempatan bertakziah... 🍀



## Duka Mereka, Duka Kita Semua

**W**ajah-wajah cemas dan suara istighfar terus terbayang usai saya menyaksikan video 'hujan' batu raksasa. Nurani saya tergerak. Lalu saya putuskan meninjau langsung ke lokasi musibah.

Setibanya di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, peman-

dangan menyedihkan tersaji di depan mata. Terlihat rumah yang hancur tertimpa batu dengan ketinggian 4 meter, halaman sekolah tempat anak-anak bermain tergeletak batu setinggi 2 meter. Dan batu setinggi 12 meter yang menggelinding dari atas dan berhenti di pekarangan rumah warga.

Saya tak dapat membayangkan betapa sedihnya para warga yang tertimpa musibah ini. Melihat rumah yang mereka bangun dengan susah payah rubuh seketika. Rasa duka masih menyengat ketika saya hadir, Kamis, 10 Oktober siang jelang sore hari, dua hari usai kejadian mengerikan itu terjadi. Bahkan masih menyisakan trauma. Bersyukur pihak polres Purwakarta membantu masyarakat melalui *trauma healing*.

Alhamdulillah, langit duka berangsur menghilang hari itu. Bertepatan dengan kedatangan saya, hujan mengguyur membawa kesejukan, di kantor PT MSS juga sedang terjadi musyawarah dari pihak terkait, mencari penyelesaian secara kekeluargaan tanpa merugikan masyarakat yang menjadi korban.

Saya menyaksikan dan mendengar langsung jalannya musyawarah antara pimpinan pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan PT Mandiri Sejahtera Sentra (MMS). Pertemuan menghasilkan kesepakatan. Pihak PT MMS siap bertanggungjawab dan dan mengabdikan

semua tuntutan masyarakat dengan mengganti kerugian sebesar Rp 2.065.000.000 dan memperbaiki jalan desa yang terdampak. Saya mengapresiasi ini karena pihak perusahaan cepat tanggap dengan menyanggupi permintaan warga dan berkomitmen membayar ganti rugi.

Musibah ini harus jadi momentum perbaikan dari hulu ke hilir terkait tambang batu. Tidak hanya fokus pada cabut izin, tapi yang lebih penting dari itu adalah perketat pemberian izin, lakukan pengawasan dan evaluasi berkala. Pihak-pihak terkait harus secepat mungkin membuat langkah-langkah perbaikan menyeluruh yang bersifat antisipatif.

Dalam kesepakatan di atas juga mensyaratkan bahwa operasionalisasi PT MSS ke depan diperkenankan setelah melihat hasil kajian kelayakan dari Inspektur Pertambangan.

Sebagai wakil rakyat, saya merasa lega bisa mendatangi langsung masyarakat yang terkena musibah dan berada di daerah pemilihan saya. Sebab, kesusahan mereka adalah kesusahan saya juga. Kesedihan mereka juga kesedihan saya. Dan saya harus mampu memberikan solusi atau setidaknya berempati dengan penderitaan mereka.

Semoga Allah SWT memudahkan urusan warga yang tertimpa musibah di Purwakarta. Karena duka mereka adalah duka kita bersama. Aamiin. 🙏



## Belajar Dari Kang Agis

**A**lhhamdulillah hari ini saya bersama istri, anak dan sahabat-sahabat Asyik berkesempatan hadir di Komunitas Jawaara Farm yang terletak di Desa Waringinkurung, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Banten.

Keingintahuan saya terhadap Jawaara Farm semakin menguat setelah melihat success story pendiri Jawaara Farm, Nur Agus Aulia, pemuda berusia 27 tahun dalam banyak tayangan YouTube.

Agis, seorang pemuda yang tekun dan konsisten ingin memajukan pertanian dan peternakan. Meskipun ia telah diterima menjadi karyawan salah satu BUMN. Namun, kesempatan itu tidak ia manfaatkan. Ia tetap bersikeras ingin memajukan pertanian dan peternakan. Orangtuanya sempat kecewa dengan keputusannya ini.

Di tahun pertama ia berkecimpung di dunia pertanian, memang masih trial and error, belum punya pola dalam memajukan pertanian.



Sampai akhirnya ia menemukan gagasan sebagai petani tidak bisa mengandalkan hasil panen padi saja. Tetapi harus ada penghasilan harian, penghasilan pakanan, penghasilan bulanan dan penghasilan tahunan.

Penghasilan harian ia dapatkan dari penjualan susu

kambing peliharaannya, penghasilan pekanannya ia dapatkan dari hasil penjualan palawija dengan pola tanam yang diatur sehingga setiap pekan bisa panen. Penghasilan bulanan ia dapatkan dari layanan aqiqah. Dan penghasilan tahunan dari penjualan hewan kurban.

Di samping itu, ia juga mengganti pakan ternak yang biasanya menggunakan rumput -ini merupakan komponen biasa terbesar dalam peternakan- dengan limbah seperti kulit kacang hijau yang dikeringkan dan bongkrek.

Kini ia memiliki 6 lahan pertanian dan peternakan yang terpisah. Salah satunya digunakan sebagai sarana pembelajaran yang disebut Kebon Al-Qur'an Banten. Mengapa dinamakan seperti itu? Karena inspirasi ia bertani bersumberkan dari al-Qur'an dan Assunnah, dan menjadi salah satu kurikulum yang diajarkan kepada para petani.

Sukses pribadinya dalam mengembangkan pertanian dan peternakan tidak membuatnya puas. Ia ingin sukses itu dirasakan bersama dengan petani-petani lainnya dengan membuat kelompok-kelompok tani.

Seharian ini saya banyak belajar dari Kang Agis tentang pertanian dan peternakan bersama sahabat-sahabat Asyik, dengan harapan ilmu yang didapat hari ini bisa dikembangkan di dapil saya: Bekasi, Karawang dan Purwakarta yang sangat potensial di bidang pertanian. Semoga bisa terwujud. 🍀



## Beramal dan Berkemajuan: Inspirasi dari Muhammadiyah

Pagi ini saya bertandang ke Gedung PP Muhammadiyah di Jakarta. Ada undangan untuk hadir dalam acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid At Tanwir.

Masjid akan dibangun enam lantai. Spirit masjid tersebut adalah ramah lingkungan dan berkemajuan.

Jujur, banyak inspirasi yang saya dapatkan dari Muhammadiyah. Sejak berdiri pada 18 November 1912, organisasi besutan KH. Ahmad Dahlan ini tak pernah berhenti berkontribusi. Amal usahanya dimana-mana, tersebar di seantero negeri. Bidangnya pun beragam, dari rumah sakit hingga pendidikan.

Muhammadiyah adalah cerminan sebuah lembaga yang sudah menyelesaikan persoalannya sendiri. Sehingga mampu beramal dan memberikan kemajuan untuk umat, bangsa dan negara.



**Muhammadiyah adalah cerminan sebuah lembaga yang sudah menyelesaikan persoalannya sendiri. Sehingga mampu beramal dan memberikan kemajuan untuk umat, bangsa dan negara.**

Spirit amal dan kemajuan ini yang harus ditiru oleh umat Islam. Sebab hanya dengan cara itulah, kehadiran kita dapat bermanfaat dan dirasakan dampaknya oleh lingkungan sekitar.

*Khoirunnas anfa'uhum linnas.* Sebaik-baik manusia

adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.

Amal menunjukkan kita terus bergerak. Dinamis. Tidak diam. Dengan dilandasi keikhlasan, amal yang kita lakukan akan memiliki daya ledak yang dahsyat. Ujungnya adalah akan datangnya kemajuan bagi kita.

Tanpa amal dan keikhlasan, jangan pernah berharap kita akan berkemajuan. Yang ada justru kita terlihat besar tapi sesungguhnya ringkih karena teramat banyak penyakit yang kita idap.

Kita perlu mengambil inspirasi dari pesan KH. Ahmad Dahlan. Kata beliau, "Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah."

Dalam konteks umat Islam, pesan itu bisa seperti ini: "Hidup-hidupilah Islam. Jangan mencari hidup dalam Islam".

Semoga. 🍀

## Karena Anak Muda Agen Perubahan



Tiga hari terakhir ini saya bertemu dengan anak-anak muda yang luar biasa. Setelah berjumpa dengan Nur Agis Aulia pada Sabtu, 12 Oktober, hari ini saya bersua dengan 1.500 mahasiswa dari 16 provinsi.

Bukan cuma mahasiswa. Mereka adalah anak-anak muda yang juga berstatus pengusaha. Sambil belajar di kampus, mereka juga berwirausaha. Mereka tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia (Himapindo).

Kang Agis dan 1.500 mahasiswa ini merupakan sosok

inspirasi. Kaya akan ide, kreatif dan memiliki visi jauh ke depan.

Begitulah seharusnya anak-anak muda. Bergerak. Bergerak. Dan terus bergerak. Mereka ini yang disebut generasi milenial.

Data BPS 2018, jumlah generasi millennial berusia 20-35 tahun mencapai 24 persen, setara dengan 63,4 juta dari 179,1 juta jiwa yang merupakan usia produktif (14-64 tahun). Inilah yang disebut sebagai bonus demografi.

Bonus demografi ini ibarat pisau bermata dua. Bisa menguntungkan, namun juga dapat merugikan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka bonus demografi ini akan jadi beban berat bagi pemerintah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data penduduk usia produktif yang menganggur alias tak punya pekerjaan berjumlah 5,01 persen. Data tersebut menjadi gambaran angka pengangguran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Jumlah pengangguran itu bahkan disebut sebut besarnya melebihi Laos dan Kamboja. Indonesia tertinggal dari Laos dan Kamboja, yang secara berurutan mencatatkan 0,60 persen dan 0,10 persen pengangguran dalam data BPS.

Artinya, melansir situs nasional, ini memang menjadi angka terendah dalam sejarah Indonesia, tetapi tetap

menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara.

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada kebijakan menyeluruh agar bonus demografi jadi menguntungkan buat kita. Karena itu, sosok-sosok seperti Kang Agis dan 1.500 mahasiswa yang hari ini saya jumpai harus lebih banyak diduplikasi.

Ingat, pemuda adalah agen perubahan. Negeri ini merdeka tersebut perjuangannya anak-anak muda kala itu. Ada Soekarno, Hatta, M. Natsir, Agus Salim dan lainnya. Perubahan-perubahan besar di negara ini juga kerap dilakukan anak-anak muda. Mulai dari Sumpah Pemuda hingga Reformasi 1998.

Dalam sejarah Islam, anak-anak muda juga berkontribusi besar. Ada Ali bin Abi Thalib, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan hingga Mushab bin Umair. Di usianya yang belasan tahun, mereka sudah menjadi panglima perang.

Saya pun teringat pesan Bung Karno soal pemuda ini:

Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia." 🙏

## Dari Menjenguk Orang Sakit, Kita Belajar Banyak Hal



**D**i sela-sela agenda kedewanan, saya menyempatkan diri menjenguk Ustadz Dijantono di rumah sakit. Beliau adalah ajudan Alm. Ustadz Arifin Ilham semasa hidup.

Dalam Islam, menjenguk orang sakit sangat dianjurkan. Banyak keutamaan yang diberikan kepada mereka yang mengunjungi kerabatnya yang sakit.

Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim (yang sedang sakit), maka (seakan-akan) dia berjalan sambil memetik buah-buahan Surga sehingga dia duduk, apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari maka tujuh puluh ribu malaikat mendo'akannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka tujuh puluh ribu malaikat mendo'akannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba." (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad shahih).

Di sisi lain, dengan menjenguk orang sakit akan membuat kita banyak bersyukur. Ternyata selama ini begitu melimpah nikmat yang telah dan sedang Allah SWT berikan kepada kita. Jika kita ingin menghitungnya, niscaya tak akan pernah kita mampu. Tapi sayangnya, kita kerap kali lupa dengan semua itu. Baru menyadari ketika kita sakit atau tertimpa musibah.

Bagi seorang pemimpin, menjenguk orang sakit akan membawa dampak pada cara pandangny tentang kekuasaan. Jabatan dan tahta yang kita miliki hanyalah titipan. Suatu saat akan diambil dari kita. Entah melalui kematian atau sakit.



Di sisi lain, dengan menjenguk orang sakit akan membuat kita banyak bersyukur. Ternyata selama ini begitu melimpah nikmat yang telah dan sedang Allah SWT berikan kepada kita.

Sebab itu, selama kita berkuasa, baik sebagai presiden, menteri, gubernur, walikota, bupati atau wakil rakyat, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara. Jangan justru dijadikan kesempatan untuk menumpuk kekayaan dengan cara korupsi dan kolusi.

Karena itu, sering-sering kita menjenguk orang sakit. Dengan cara itu, kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur dan memiliki orientasi akhirat ketika sedang berkuasa.

Semoga. 🍀



## Memantaskan Demokrasi

Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden, kabar soal pertemuan elit-elit politik kian sering terdengar. Saling berkunjung. Berbicara soal bangsa dan negara, katanya.

Jika demikian, kita patut bersyukur. Karena sudah seharusnya para elit politik berkomunikasi. Menjalin hubungan dan mendiskusikan masalah bangsa yang semakin rumit. Kita tentu saja sangat mendukung adanya pertemuan-pertemuan semacam itu.

Lain hal jika perjumpaan antar elit hanya bicara bagi-bagi kekuasaan. Kamu dapat ini. Kami memperoleh ini. Sebab, politik bukan cuma tentang kekuasaan. Tapi lebih dari itu, yakni soal khidmat atau pelayanan kepada rakyat. Dan itu tak mesti dilakukan dalam kekuasaan.

Saya, dan kita semua pasti khawatir dengan fenomena akhir-akhir ini. Tentang kemungkinan akan bergabungnya partai-partai ke pemerintah. Padahal saat pemilu lalu berada dalam kubu seberang.

Mengapa ini mengkhawatirkan? Sebab, jika tak ada lagi penyeimbang, maka kontrol terhadap pemerintah akan sirna. Kekuasaan bisa dilakukan secara absolut. Bahaya.

Lord Acton pernah mewanti-wanti soal kekuasaan yang tak terkontrol.

*"Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely."*

Dalam banyak literatur ilmu politik, adanya kekuatan penyeimbang atau sering disebut oposisi adalah keniscayaan. Tak ada demokrasi tanpa kontrol. Tak ada demokrasi tanpa pengawasan.

Jika kita sepakat memilih demokrasi, maka kita juga harus sepakat perlunya kehadiran penyeimbang di parlemen. Keberadaannya adalah anak kandung demokrasi. Bukan anak haram.

Jangan pula mereka yang siap mengawal dan menga-



**Jangan pula mereka yang siap mengawal dan mengawasi pemerintah dari luar ditakut-takuti. Atau disebut tak ingin adanya rekonsiliasi dan persatuan.**

wasi pemerintah dari luar ditakut-takuti. Atau disebut tak ingin adanya rekonsiliasi dan persatuan.

Tak ada kaitan antara menjadi oposisi dan tak menginginkan persatuan atau rekonsiliasi. Kerja-kerja pengawasan kepada pemerintah justru untuk memastikan bahwa roda kekuasaan dijalankan untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Akhirnya, kita berharap semua pihak saling menghargai pilihan politik masing-masing. Jika ada dalam kekuasaan, bekerjalah sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat. Jika berada di luar kekuasaan, berikhtirlah semaksimal mungkin untuk memastikan pemerintah menjadikan rakyat sebagai prioritas utama.

Secara demikian, demokrasi di negeri ini akan tetap hidup. Dan kita memantaskan diri sebagai negara demokrasi karena memberikan ruang kepada oposisi. 🍀

## Santri: Dulu, Kini dan Esok



**E**mpat tahun sudah Hari Santri Nasional (HSN) berlangsung, usai dicanangkan Presiden Jokowi pada 22 Oktober 2015. Setiap tahun, perayaan HSN berlangsung meriah, dalam skala nasional maupun lokal.

HSN harus jadi momentum semua pihak dalam melihat sosok santri sesungguhnya. Caranya adalah dengan melongok sejarah. Sehingga akan terkuak wajah asli umat Islam yang direpresentasikan oleh kaum santri.

Di sisi lain, dengan berkaca pada sejarah, maka kita

pun dapat memposisikan peran seperti apa yang perlu dimainkan santri dewasa ini dan masa depan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "santri" setidaknya mengandung dua makna. Arti pertama adalah orang yang mendalami agama Islam, dan pemaknaan kedua adalah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh atau orang yang saleh. Santri selama ini digunakan untuk menyebut kaum atau orang-orang yang sedang atau pernah memperdalam ajaran agama Islam di pondok pesantren. Kata "pesantren" oleh sebagian kalangan diyakini sebagai asal-usul tercetusnya istilah "santri."

Sosok santri seperti definisi di atas diakui menjadi tulang punggung memerdekakan Indonesia dari cengkeraman penjajah. Itulah yang disampaikan Jokowi saat menyampaikan alasannya mengapa harus ada HSN.

"Sejarah telah mencatat peran besar para ulama, kiai, para santri dalam masa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI dalam menjaga bhinneka tunggal ika dan selalu memandu ke jalan kebaikan, ke jalan kebenaran, ke jalan kemajuan," kata Jokowi di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (20/10/2018).

Faktanya memang demikian. Santri bersama ulama dan umat Islam lainnya bahu membahu berjuang. Tersebutlah

nama-nama seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Haji Samanhudi, KH. Ahmad Dahlan hingga KH. Hasyim Asy'ari. Juga ada Jenderal Soedirman dan Bung Tomo yang teriakan takbirnya mampu menggelorakan semangat arek-arek Suroboyo.

Penetapan HSN sendiri merujuk pada peristiwa bersejarah yakni seruan yang dibacakan oleh Pahlawan Nasional KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Seruan ini berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang (jihad) melawan tentara Sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan. Sekutu ini maksudnya adalah Inggris sebagai pemenang Perang Dunia II untuk mengambil alih tanah jajahan Jepang. Di belakang tentara Inggris, rupanya ada pasukan Belanda yang ikut membonceng. Seruan KH Hasyim Asy'ari dikenal dengan Resolusi Jihad.

Paska kemerdekaan, medan juang santri mengalami perubahan. Bukan lagi berjuang mengangkat senjata dan bambu runcing. Tapi mengisi kemerdekaan dengan berkontribusi di berbagai bidang kehidupan. Musuhnya bukan lagi imperialisme dan kolonialisme, tapi sekularisme dan liberalisme.

Situasi ini terutama terlihat saat Orde Baru. Dengan jargon pembangunannya, pemerintah memobilisasi semua lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam



Saat ini dan ke depan,  
tantangan santri  
tidaklah mudah.  
Perkembangan  
teknologi komunikasi  
menjadi penyebabnya.  
Godaan dunia  
semakin menerjang.  
*Smartphone*, internet  
dan *game online*  
merajalela.

pembangunan. Kaum santri pun tak luput. Banyak lulusan pesantren yang berkontribusi di berbagai bidang. Mereka berkiprah sesuai bidangnya.

Paska Orde Baru, peran santri kian signifikan. Terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden dianggap sebagai 'kemenangan' kaum santri di pentas politik nasional. Gus Dur dinilai sosok tepat representasi umat.

Setelah itu, sosok santri lainnya juga mencuat. Yakni Hidayat Nurwahid yang terpilih sebagai Ketua MPR periode 2004-2009. Politisi PKS ini dianggap sebagai sosok santri

sukses di panggung politik nasional. Kini juga ada KH. Ma'ruf Amin yang baru saja dilantik menjadi Wakil Presiden periode 2019-2024.

Di luar itu, banyak tokoh nasional yang dulunya santri. Sebut saja Menristek Dikti Muhammad Nasir yang menempuh pendidikan di madrasah tsanawiyah (MTs) di Pondok Pesantren Mambaul Ilmi Asy-Syar'i Sarang, Rembang, dan saat SMA, dia menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Islah, Kediri.

Ada pula Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir (AM Fachir) yang merupakan lulusan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur Pesantren Wali Songo Ngabar.

Jangan lupa dengan Emha Ainun Najib, budayawan kondang yang juga santri. Kemudian Ahmad Fuadi, penulis novel best seller Negeri Lima Menara. Ada Mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Last but not least, mantan Pemred Republika Ikhwanul Kiram Mashuri.

Saat ini dan ke depan, tantangan santri tidaklah mudah. Perkembangan teknologi komunikasi menjadi penyebabnya. Godaan dunia semakin menerjang. *Smart-phone*, internet dan *game online* merajalela. Situasi yang harus dihadapi oleh santri penuh dinamika. Banyak orang menyebutnya sebagai Era *Disruption*. Penuh guncangan.

HSN bukan sekadar diperingati. Lebih dari itu,

harus menjadikan santri sosok yang dihormati. Bukan seperti warga negara kelas dua. Sebab sejarah sudah membuktikan, tak akan ada kemerdekaan jika tiada perjuangan santri.

Tempatkan santri dalam posisi yang layak. Bukan lagi dipinggiran. Bukan lagi cuma sebagai vote getter atau pendorong mobil mogok saat jelang pemilu. Karena berkaca pada sejarah, santri layak menduduki posisi-posisi penting, bukan hanya pemanis. Kesetiaannya pada NKRI tak lagi diragukan. 🇮🇩

## Bercermin kepada Sayyidina Umar bin Khaththab



**A**da dua peristiwa penting bulan ini dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Yakni pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober lalu, dan pengucapan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada Ahad, 20 Oktober ini.

Mengucap janji sebagai pemimpin dibawah Al Qur'an adalah hal yang sangat berat, bagi mereka yang

menyadarinya. Setiap bait sumpah yang terucap dari lisan kita harus dipertanggungjawabkan di dunia akhirat. Bukan sekadar rangkaian kata-kata indah.

Ada konsekuensi yang harus kita pikul. Ada amanah yang harus kita jalankan. Ada janji yang harus kita tunaikan.

Begitulah menjadi seorang pemimpin. Sungguh berat. Jarak antara surga dan neraka teramat dekat. Jika mampu mengemban amanah, surga menanti. Namun ketika lalai saat menjalankan tugas, neraka di depan mata.

Sebab itulah Sayyidina Umar bin Khaththab tak jumawa usai dirinya dilantik menjadi khalifah. Sayyidina Umar mengawali pidatonya dengan mengucapkan hamdalah, shalawat, dan memaparkan beberapa jasa Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu baru menyampaikan pidatonya yang menyejarah.

"Saudara-saudara! Saya hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah (Sayyidina Abu Bakar) saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Allahumma ya Allah, saya ini sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Allahumma ya Allah saya sangat lemah, maka berikanlah kekuatan. Allahumma ya Allah saya ini kikir, jadikanlah saya orang dermawan bermurah hati."

Sayyidana Umar tiba-tiba berhenti sejenak. Sang Khalifah baru melanjutkan pidatonya usai kaum muslim tenang.

"Allah telah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggal sahabat-sahabatku, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Tidak ada persoalan kalian yang harus saya hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya, dan tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik akan saya balas dengan kebaikan, tetapi kalau melakukan kejahatan terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka."

Usai berpidato, Sayyidina Umar turun dari mimbar dan langsung mengimami Shalat Dzuhur. Sungguh pemandangan yang indah.

Dari pidato tersebut, kita bisa mengambil hikmah. Pertama, jabatan adalah sebuah tanggungjawab. Karena itu tidak perlu diperebutkan. Apalagi sampai mengorbankan nyawa orang-orang tak berdosa.

Kedua, Sayyidina Umar mengakui kelemahan dirinya. Alih-alih angkuh, beliau justru memaparkan deretan kekurangannya. Memiliki watak yang keras, kasar, lemah, dan sebagainya. Sebab itu, Sayyidina Umar berdoa kepada Allah SWT untuk selalu membimbingnya menjalankan amanah tersebut.

Ketiga, menjadi pemimpin dan yang dipimpin adalah ujian. Sayyidina Umar sadar bahwa menjadi pemimpin itu adalah ujian. Begitupun mereka yang dipimpin. Karena

itu, baik pemimpin atau yang dipimpin harus saling mengingatkan agar apa yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah.

Keempat, tugas pemimpin adalah menyelesaikan persoalan rakyatnya. Bukan menyengsarakan apalagi bertindak zalim. Rakyat harus dilindungi dan disejahterakan.

Kepada siapa saja yang diamanahi menjadi pemimpin, termasuk saya, renungkanlah apa yang Sayyidina Umar sampaikan dalam pidatonya tersebut. Bercerminlah kepada Sayyidina Umar. Agar sumpah jabatan yang terucap saat pelantikan bukan sebatas janji manis belaka. 🙏



**Menjadi pemimpin dan yang dipimpin adalah ujian. Sayyidina Umar sadar bahwa menjadi pemimpin itu adalah ujian. Begitupun mereka yang dipimpin. Karena itu, baik pemimpin atau yang dipimpin harus saling mengingatkan agar apa yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah.**



## Bike To Work: Bergerak dan Siap Bekerja

**R**abu (23/10/2019), pagi. Saya berangkat ke Gedung DPR dengan cara berbeda. Dengan bersepeda.

Bersepeda sudah sering saya lakoni. Tapi menyusuri Bekasi-Jakarta ketika ribuan motor dan mobil bergerak dalam waktu bersamaan, jadi pengalaman pertama saya.

Sekitar pukul 06.10 WIB saya meluncur dari rumah di Pondok Gede, Bekasi. Menuju ke titik kumpul di Lampu Merah Pangkalan Jati, Jatiwaringin, persis di tepi Kalimantan. Jam 06.40 WIB tiba. Sahabat-sahabat dari Robek (Rombongan Bekasi) Bike To Work sudah menanti.

"Ini Pak Ustadz Syaikhu ya," kata salah seorang anggota komunitas, agak terkejut.

Setelah menunggu kurang lebih 15 menit, saya dan rombongan berangkat. Menyusuri Jalan Raya Kalimalang-Polonia Cipinang Cempedak-Otista-Kampung Melayu-Kuningan-Gatot Subroto.

Kami memacu sepeda sepanjang kira-kira 25 Km. Menempuh perjalanan selama dua jam. Tiba di Senayan sekitar pukul 09.00 WIB.

Lelah? Jelas. Berkeringat? Tentu. Tapi ada kepuasan tersendiri yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bersepeda. Tubuh terasa segar.

Saya membayangkan jika komunitas-komunitas semacam ini diperbanyak. Persoalan seperti kemacetan, polusi udara dan sebagainya bisa dipecahkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sudah coba menggalakkan soal bersepeda ini.

Banyak yang bisa dipetik dari bersepeda. Selain badan jadi sehat, bisa juga menambah sahabat. Terakhir, bersepeda menunjukkan kesiapan untuk terus bergerak dan bekerja. Sebab sepeda hanya dapat berjalan dan melaju dengan cepat ketika dikayuh. Seperti kata Albert Einstein:

*"Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving."* 🍷

## Amanah Baru: Menjadi Wakil Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)



**A**manah baru datang lagi. Kali ini, Ketua Fraksi PKS DPR RI Ustadz. Jazuli Juwaini dan pimpinan lainnya meminta saya menjadi Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Sebagai kader partai dan prajurit, saya tak dapat menolak. Apa yang pimpinan perintahkan, akan saya

laksanakan tanpa reserve. Sebab, mereka pasti sudah mempertimbangkan banyak hal. Dari berbagai sudut. Menganalisis kelebihan dan kekurangannya.

Jika ditanya, bagaimana rasanya dengan amanah baru ini? Tak bisa saya ungkapkan. Sudah pasti terasa berat. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi peluang bagi saya untuk mengawal dan mengawasi keuangan negara.

BAKN dibentuk untuk meningkatkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI serta mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam fungsi pengawasan. Pembentukannya berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap, BAKN dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan BAKN akan berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik/masyarakat DPR RI khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan.

Perlu diketahui, APBN 2020 kita begitu besar. Ada perubahan pada pendapatan dan pengeluaran negara, yakni mengalami kenaikan Rp 11,6 triliun. Pendapatan ditargetkan sebesar Rp 2.233,2 triliun pada, sedangkan usulan awal sebesar Rp 2.221,5. Sementara belanja negara naik menjadi Rp 2.540,4 triliun dari usulan awal Rp 2.528,8 triliun.

Pada titik inilah BAKN memiliki fungsi strategis. Sebagai alat kontrol agar anggaran yang dikelola pemerintah bisa digunakan secara benar. Transparan dan akuntabel.

Mohon doa. Agar semua penyelenggara negara amanah. Bekerja sebaik-baiknya mengelola anggaran untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Aamiin. 🙏



**Jika ditanya, bagaimana rasanya dengan amanah baru ini? Tak bisa saya ungkapkan. Sudah pasti terasa berat. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi peluang bagi saya untuk mengawal dan mengawasi keuangan negara.**

## Sebait Sumpah Agar Indonesia Tak Lekang



Roda sejarah bergulir cepat. Bahkan teramat cepat. Bermula dari secarik kertas yang berpindah tangan dari Mohammad Yamin.

Usai dia menggoreskan untaian bait di atasnya, Mohammad Yamin segera memberikan kertas tersebut kepada Ketua Kongres Pemuda II Soegondo Djojopoespito. Yamin berbisik kepada Soegondo.

"Saya punya rumusan resolusi yang elegan," ujarnya sambil memberikan lembaran kertas bersejarah tersebut.

Soegondo langsung membaca tulisan di atas kertas dari Yamin. Lalu dia memandang Yamin dan dibalas dengan dengan senyuman. Soegondo memparaf rancangan dari Yamin tanpa komentar. Selebar kertas itu lalu Sang Ketua teruskan ke Amir Sjarifuddin yang sempat bingung. Dipandanginya Soegondo dengan tatapan bertanya-tanya. Soegondo kemudian menjawab dengan anggukan.

Amir lalu memberikan paraf setuju. Kemudian diikuti dengan persetujuan pula dari seluruh utusan organisasi pemuda. Awalnya, perjanjian itu bernama Ikrar Pemuda, lalu Yamin mengubahnya menjadi Sumpah Pemuda.

*Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia.*

*Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.*

*Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.*

Tekad anak-anak muda untuk menyatukan Indonesia yang beragam begitu kuat. Dalam rapat marathon yang digelar Sabtu sore hingga Ahad malam, 27-28 Oktober 1928, berbagai utusan hadir. Dari Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon, Pemuda Kaum

Betawi, dan lainnya.

Kini, 91 tahun sudah sejarah itu berlalu. Usia yang cukup panjang. Namun, Sumpah Pemuda tak pernah lapuk. Bait-bait sumpah dan spiritnya selalu dibutuhkan kehadirannya.

Setidaknya ada dua hal mengapa Sumpah Pemuda harus kita ingat dan teladani. Pertama, karena upaya-upaya memecah belah bangsa ini tak pernah absen. Terus ada. Ancaman disintegrasi membayangi kita.

Kedua, zaman sudah berubah dengan cepat. Tantangannya berbeda dengan puluhan tahun lalu. Dan anak-anak muda hari ini sudah pasti tak sama lagi. Jika Sumpah Pemuda dilupakan oleh mereka, potensi terpecahnya bangsa kian besar.

Untuk itu, saya mengajak kepada semua pihak, khususnya anak-anak muda. Kenanglah selalu Sumpah Pemuda. Karena deretan bait sumpah tersebut ditulis dan diikrarkan agar Indonesia tak lekang atau retak. 📝

## Satu Hari Penuh di Dapil: Impian Wujudkan Desa Binaan



Sejak mengucap sumpah pada 1 Oktober lalu, saya sudah membayangkan tidak mudahnya menjadi anggota DPR. Apalagi dengan Daerah Pemilihan (dapil) yang meliputi tiga kabupaten besar: Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Sadar akan hal ini, saya harus bekerja keras. Bergerak. Bergerak dan terus bergerak. Tak boleh berleha-leha.

Walau belum genap satu bulan dilantik. Meski Alat

Kelengkapan Dewan (AKD) baru terbentuk. Walau nama-nama pimpinan definitif AKD juga baru ada, tapi itu tidak boleh jadi alasan untuk diam. Sebab terbentang banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan seorang aleg. Mulai dari menyambangi dan merawat konstituen. Hingga sinergi dengan semua pihak agar kerja-kerja kedewanan bisa optimal.

Itulah yang membuat saya melakukan road show ke dapil saya. Bertemu dengan pimpinan partai dan alegnya. Saya lakukan semacam Forum Group Discussion (FGD). Curah gagasan terhadap berbagai persoalan di daerah dan menemukan solusinya. Saya juga mengajak mereka untuk merancang agenda strategis ke depan, yakni membuat desa binaan di setiap dapil.

Program desa binaan merupakan wujud tanggungjawab PKS kepada konstituennya. Juga respons dari harapan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman. Keduanya meminta kepada aleg terpilih untuk membuat desa-desa binaan di dapilnya.

Saya mengajak para anggota legislatif melakukan survei desa mana saja yang bakal menjadi proyek percontohan. Desa binaan tersebut harus mempertimbangkan potensi daerah.

Untuk mewujudkan desa binaan, tidak menutup



**Saya mengajak para anggota legislatif melakukan survei desa mana saja yang bakal menjadi proyek percontohan. Desa binaan tersebut harus mempertimbangkan potensi daerah.**

kemungkinan akan bekerjasama dengan pihak lain seperti BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta melalui bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) nya.

Satu hari penuh saya lakukan kunjungan dapil ini. Sepanjang Sabtu, (26/10) kemarin. Diawali dari Kab. Bekasi pada pagi hingga siang. Lanjut ke Karawang pada siang sampai senja. Berakhir di Purwakarta pada pukul 21.30 WIB.

Mereka sangat antusias. Tak menduga acara ini bisa terwujud dengan cepat.

Kegiatan semacam ini sangat penting sebagai ajang konsolidasi. Sebab, kerja-kerja kedewanan dari tingkat DPR, DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten butuh sinergitas. Agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Mewujudkan desa binaan salah satunya. 🗳️

## Rapat di DPR dan Mengenang Alm. Ust. Arifin Ilham

Rabu, 30 Oktober, jadwal di DPR penuh dengan rapat. Bahkan ada agenda yang waktunya bersamaan. Diawali dengan Rapat Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Lalu selang 30 menit, saya juga harus ikut rapat di Komisi V.

Sekitar 15 menit saya harus berjalan kaki menuju ruang rapat. Agendanya pengukuhan dan pengenalan pimpinan dan anggota Komisi V setiap fraksi. Saya sendiri diamanahkan sebagai Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS.

Setelah selesai di Komisi V, istirahat sejenak. Makan dan sholat Zuhur. Lalu bersiap mengikuti rapat internal BAKN pukul 13.00 WIB. Saya datang tepat waktu sesuai agenda. Setelah kuorum, rapat dimulai 30 menit kemudian.

Hari yang padat diakhiri dengan kegiatan istimewa. Saya mendapat undangan menyaksikan film perjalanan hidup Almarhum Ust. Arifin Ilham di Kalibata, Jakarta Selatan. Judulnya: Suami Yang Menangis.



Ini film luar biasa. Patut ditonton oleh kita sebagai umat Islam. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari film tersebut.

Pertama, menyadarkan kita akan beratnya perjuangan menjadi seorang ulama.

Kedua, menanamkan kecintaan kita kepada sosok ulama.

Ketiga, meneladani sikap dan perilaku ulama.

Keempat, mengajarkan kita peran seorang suami yang tak akan pernah lepas meski diri kita sebagai ulama.

Bersyukur saya menyaksikan film ini. Sebab Almarhum Ust. Arifin Ilham sosok yang layak jadi panutan. Kefaqihan agamanya, kelembutan sikapnya, keharmonisan keluarga-

nya dan metode dakwah yang dikembangkannya adalah beberapa hal yang patut menjadi contoh.

Almarhum adalah guru bagi saya, meski usianya lebih muda. Kedekatan saya dengan Almarhum semasa hidup tak bisa saya lupakan. Terutama ketika Almarhum memberikan dukungan penuh saat saya berjuang dalam Pilgub Jabar 2018.

Karena itu, saat mendengar kabar wafatnya, saya merasa sangat kehilangan. Kematian seorang ulama sama dengan dicabutnya ilmu oleh Allah SWT.

Semoga Almarhum diberikan tempat terbaik di jannahNya. Aamiin. 🍀

## BAKN dan *Muroqobatullah*



Selama tiga hari saya berada di Bali. Dari Jum'at, 1 November hingga Ahad, 3 November 2019. Agendanya Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Ini adalah Kunker pertama saya sebagai Anggota DPR ke luar kota.

Di BAKN yang merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD), saya diamanahi sebagai wakil ketua. Keberadaan lembaga ini dan fungsinya, mengingatkan saya tentang pengawasan dan penelaahan Allah SWT kepada manusia.

UU MD3 menyebutkan ada beberapa tugas BAKN. Yakni melakukan penelaahan terhadap temuan hasil BPK yang disampaikan kepada DPR dan menindaklanjuti hasil temuan itu kepada komisi terkait.

Lalu, BAKN bertugas untuk menindaklanjuti hasil pembahasan di komisi terhadap temuan pemeriksaan BPK atas permintaan komisi, dan memberikan masukan kepada BPK dalam rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan dan kualitas laporan.

Inti tugas BAKN adalah menelaah hasil audit atau pengawasan BPK. Begitu pula kita dalam menjalani hidup ini. Allah SWT selalu mengawasi tindak-tanduk kita kemudian menelaahnya saat Hari Perhitungan. Setiap detik. Tak pernah luput.

Di sebelah kiri dan kanan kita ada malaikat yang Allah SWT tugaskan untuk mengontrol kita. Mencatat setiap amal baik dan buruk yang kita laporkan. Untuk kemudian 'dilaporkan' kepada Allah SWT dan dihitung atau ditelaah saat Yaumul Hisab.

Kita harus merasa selalu dalam pengawasan dan penelaahan Allah SWT. Atau disebut *muroqobatullah*.

Allah SWT berfirman, "Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Alquran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biar pun sebesar zarah (atom) di bumi atau pun di langit. Tidak ada yang lebih kecil

dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata." (QS Yunus (10): 61)

Dalam ajaran Islam, *muraqabatullah* merupakan suatu kedudukan yang tinggi. Hadis menyebutkan bahwa *muroqobatullah* sejajar dengan tingkatan ihsan, yakni beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya dan jika kita tak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. (Muttafaq alaih)

Abdullah bin Dinar berkata, "Pada suatu hari, aku pergi ke Makkah bersama Umar bin Khaththab. Di salah satu jalan, kami berhenti untuk istirahat, tiba-tiba salah seorang penggembala turun kepada kami dari gunung. Umar bin Khaththab bertanya kepada penggembala tersebut, 'Hai penggembala, juallah seekor kambingmu kepada kami!'"

Penggembala tersebut berkata, "Kambing-kambing ini bukan milikku, tapi milik majikanku." Umar bin Khaththab berkata, "Katakan saja kepada majikanmu bahwa kambingnya dimakan serigala."

Namun, penggembala yang budak tersebut berkata, "Kalaubegitu, di mana Allah?" Umar bin Khaththab menangis, kemudian ia pergi ke majikan penggembala tersebut, lalu membeli budak tersebut dan memerdekakannya."

Jika sikap *muroqobatullah* dimiliki oleh semua penyelenggara negara dan kita, maka bangsa dan negara ini akan bebas korupsi, akuntabel dan muaranya menyejahterakan rakyatnya.

Dari Rasulullah SAW Kita Belajar Komitmen dan Etika dalam Kehidupan.

Hari ini kita memperingati Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beragam ucapan hilir-mudik. Mengajak untuk meneladani Nabi Akhir Zaman itu.

Saya melihat ada sikap yang dapat kita ambil sebagai suri teladan dari Rasulullah SAW. Yakni soal komitmen dan etika dalam kehidupan.

Sungguh menyedihkan. Ketika kita bicara komitmen dan etika dalam menjalani kehidupan. Seakan-akan mustahil diterapkan. Ibarat mencampur minyak ke dalam air. Tak bisa melebur. Selalu terpisah.

Begitulah faktanya hari ini. Saat pagi seseorang mengatakan A. Siang berubah jadi B. Kemudian sore kembali berubah jadi C. Hingga akhirnya jadi D ketika malam hari.



**Jika sikap muroqobatullah dimiliki oleh semua penyelenggara negara dan kita, maka bangsa dan negara ini akan bebas korupsi, akuntabel dan muaranya menyejahterakan rakyatnya.**

Manuver semacam ini masih terus mewarnai kehidupan kita. Baik di dunia bisnis, sosial hingga politik. Hampir di semua lini kehidupan.

Padahal seharusnya ini tidak terjadi jika saja kita bisa meneladani tindak-tanduk Nabi Muhammad SAW. Komitmen dan etika menjadi nilai-nilai yang dipegangnya dan ditanamkan kepada para sahabat-sahabatnya.

Lihatlah Perjanjian Hudaibiyah. Ini adalah perjanjian antara kaum Muslimin Madinah dengan kaum musyrikin Mekah. Ditandatangani di Lembah Hudaibiyah, pinggiran Mekah, pada tahun ke-6 setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah.

Kala itu, rombongan kaum Muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW akan beribadah haji. Namun mereka tidak dibolehkan masuk ke Mekah oleh kaum musyrik Quraisy warga Mekah. Rasulullah SAW pun mengajak mereka bernegosiasi sampai akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian damai.

Ketika Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani oleh Nabi SAW, banyak para sahabat yang protes. Termasuk Umar bin Khaththab. Sebab, kesepakatan tersebut dinilai merugikan kaum muslimin. Salah satu hasil kesepakatannya adalah orang-orang kafir yang telah masuk Islam dan berhijrah, harus dikembalikan ke Mekah dan orang Islam yang murtad dari Islam lalu lari ke Mekah tidak dikembalikan ke kaum Muslimin.

Dampak perjanjian tersebut menimpa Abu Bashir dan Abu Jandal, dua sahabat Nabi SAW. Sebelum perjanjian itu disahkan, Abu Jandal yang telah ditahan, disiksa, dan dirantai oleh kaum kafir karena keislamannya, berulang kali dia mencoba hijrah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ia berharap dapat bergabung dengan kaum muslimin dan terbebas dari siksaan yang dialaminya.

Namun Abu Jandal terpaksa harus kembali ke Mekah.

"Aku datang untuk masuk Islam, banyak penderitaan yang aku alami. Sayang, aku akan dikembalikan lagi," ucap Abu Jandal penuh kesedihan.

Nabi Muhammad SAW hanya mampu menghibur hatinya dan memintanya bersabar.

"Dalam waktu dekat, Allah akan membukakan jalan bagimu," pesan Nabi SAW.

Ada lagi kisah Abu Bashir. Setelah Perjanjian Hudaibiyah disahkan, dia melarikan diri ke Madinah setelah keislamannya. Orang-orang kafir mengutus dua orang untuk membawanya kembali ke Mekah. Sesuai dengan perjanjian, Rasulullah SAW mengembalikan Abu Bashir kepada mereka.

Abu Bashir berkata, "Ya Rasulullah, aku datang setelah menjadi Muslim, dan engkau kembalikan aku kepada kaum kafir?"

Nabi SAW menasehatinya agar bersabar, "Insya Allah, sebentar lagi Allah akan membukakan jalan bagimu."

Begitulah Rasulullah SAW berkomitmen terhadap

sebuah janji. Juga beretika terhadap musuh-musuhnya sekalipun. Nilai-nilai yang seharusnya diteladani oleh kita, umatnya di masa kini. Janji tetaplah janji. Harus ditepati. Walaupun terasa tidak menguntungkan.

Hari ini, ketika kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW, jejakilah sikap dan perilakunya sebagai pemimpin. Ikuti dan praktekan. Sebab, bangsa ini masih menghadapi banyak masalah, salah satunya sumbangan kita yang tak berkomitmen pada janjinya dan tiada memiliki etika, hampir di semua bidang kehidupan.

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu..." (QS. An-Nahl; 91-92) 📖

## Memperjuangkan Aspirasi Keluarga Korban Pesawat Lion Air JT 610



Seorang ibu menangis terisak saat mengisahkan tak kunjung ditemukannya jasad suaminya.

"Mamah, ayah dimana. Kok tidak pulang-pulang?" Tanya anaknya.

Kenny, nama ibu tersebut, tak mampu menjawabnya. Sebab jika dia mengatakan 'ayah meninggal', tapi dia tak bisa menunjukkan dimana tubuh dan kuburannya.

Suasana di Ruang Pleno Frkasi PKS di Gedung DPR, Senayan mendadak senyap. Keharuan merebak.

Hari itu, Jum'at (8/11/2019), Kenny bersama 6 orang keluarga korban Pesawat Lion Air JT 610 datang menemui

Anggota Komisi V Fraksi PKS Ahmad Syaikh. Pertemuan ini bermula dari informasi yang mereka dapatkan di media sosial. Mereka membaca berita pernyataan Ahmad Syaikh yang meminta Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkut Udara direvisi. Para keluarga korban pun merespons itu dan menghubungi Ahmad Syaikh untuk meminta bertemu guna menyampaikan aspirasi.

Dalam pertemuan tersebut, ada banyak hal yang disampaikan keluarga korban.

1. Mereka sangat bergembira masih ada pihak yang peduli dengan kasus jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610. Menurut mereka, peristiwa tersebut sudah dilupakan banyak pihak, terutama pihak-pihak terkait sehingga sudah hampir tidak ada lagi pemberitaan seputar kasus tersebut. Padahal, masalah ini belum selesai. Salah satunya soal ganti kerugian kepada Ahli Waris korban.
2. Mereka menyatakan sudah hilang harapan pada sistem hukum di Indonesia. Berbagai cara sudah ditempuh tapi tak juga selesai masalahnya. Pihak pemangku kebijakan pun terkesan tak peduli lagi dengan kasus ini. Sehingga mereka melakukan upaya hukum di luar negeri, tepatnya di pengadilan Chicago, Amerika Serikat.
3. Mereka juga menyampaikan soal pencarian jenazah yang tak tuntas. Banyak jasad yang tak ditemukan.

Mereka bahkan patungan sendiri sebesar Rp 132 Juta guna mencari jasad sanak saudaranya.

Alhamdulillah, saya bersama anggota Komisi V dari Fraksi PKS merespons aduan ini. Kami sepakat untuk menindaklanjuti dan menyampaikan ini kepada Menteri Perhubungan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Dan Rabu, (13/11/2019) kemarin, aspirasi tersebut sudah kami sampaikan langsung saat RDP dengan Kemenhub. Kebetulan saya berhalangan hadir karena ada agenda kunjungan kerja sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) di Yogyakarta. Sahabat saya, Pak Suryadi menyampaikan langsung hasil pertemuan saya dengan keluarga korban.

Kami dari Fraksi PKS berpendapat:

Pertama, mendesak Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara untuk memberikan peringatan kepada pihak Lion Air untuk segera menyelesaikan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa meminta syarat apapun kepada ahli waris.

Kedua, mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk merevisi Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011 agar memberikan batas waktu dan menetapkan sanksi keterlambatan kepada pihak pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara agar

dapat menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 3 bulan setelah penumpang yang berada dalam pesawat udara yang mengalami kecelakaan dinyatakan meninggal.

Ketiga, mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan pelarangan terbang pesawat Boeing 737 MAX sampai semua rekomendasi dari KNKT telah dijalankan dan seluruh kompensasi diberikan kepada para ahli waris.

Keempat, mendesak maskapai Lion Air agar aktif melayani keluarga ahli waris dengan cara membantu mendaftarkannya kepada Boeing agar segera mendapatkan juga kompensasi dari Boeing.

Kelima, segera diadakan pertemuan antara pihak Kemenhub, Lion Air dan Asuransi Tugu Pratama terkait perkembangan pembayaran ganti kerugian kepada keluarga korban dan meminta penjelasan terkait klausul "Release and Discharge".

Kecelakaan pesawat di Perairan Karawang itu sudah terjadi lebih dari satu tahun. Kami berharap segera tuntas masalahnya.

Semoga kita semua dapat berempati dan menindaklanjuti persoalan tersebut. Sebab ini adalah soal hati nurani dan kemanusiaan.

Dan kami tak ingin ada lagi air mata dan isak tangis yang keluar, seperti yang terjadi pada Ibu Kenny. 🙏

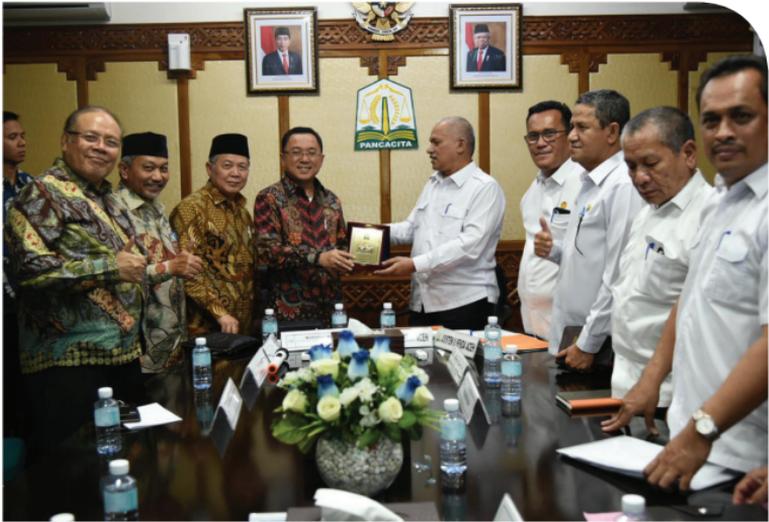
## Kunjungan Kerja ke Pemprov Aceh

Sebuah Kunjungan Kerja (Kunker) ke wilayah paling barat negeri ini saya lakukan. Bersama pimpinan dan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), saya kunker ke Provinsi Aceh, Rabu (20/11/2019).

Agendanya melakukan pendalaman materi terkait telaahan tentang Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Selama satu hari, kami bertemu dengan jajaran Pemprov Aceh.

Untuk diketahui, Provinsi Aceh telah menerima kucuran DOKA sejak tahun 2008. Secara kumulatif sampai dengan tahun 2019 DOKA yang dikucurkan berjumlah 73,3 trilyun rupiah. DOKA digunakan untuk membantu Pemerintah Aceh dalam upaya untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan masyarakat Aceh pasca konflik.

Sampai dengan saat kunker dilakukan, DOKA telah mampu mengembalikan angka kemiskinan seperti pada tahun 2000 yaitu di angka 15 persen. Angka kemiskinan



Aceh merupakan tertinggi di Sumatera, bahkan pernah mengalami peningkatan tajam sampai 32,6 persen pada tahun 2005, setelah terjadi konflik yang berkepanjangan dan tsunami di tahun 2004.

Dengan dikucurkannya DOKA, ditambah dana *recovery* pasca tsunami oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) sebesar 72 trilyun dan mulai mengalirnya dana desa, angka kemiskinan Aceh berangsur turun sehingga dapat ditekan kembali hingga menjadi 15,32 persen.

Mengingat DOKA menjadi bagian utama dalam penerimaan dalam APB Aceh (lebih dari 50 persen dari APB Aceh) maka perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya hendaknya dilakukan dengan baik.

Saya meminta Pemprov Aceh untuk memperbaiki pelaksanaan penyerapan DOKA ini, jangan sampai terjadi seperti tahun 2017 dimana penyerapan DOKA tidak optimal yang mengakibatkan 896 M menjadi SILPA, di Pemerintah provinsi sebesar 557 M dan di Pemerintah kabupaten/kota sebesar 339 M. Hal ini sangat disayangkan karena akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Aceh.

Demikian juga dalam pelaksanaan kegiatan DOKA, jangan sampai dilakukan menjelang akhir tahun anggaran. Hal ini akan menyulitkan dalam penyediaan barang dan jasa, sebagaimana terungkap dalam temuan hasil pemeriksaan BPK terkait pengadaan barang dengan spesifikasi tertentu yang sulit dipenuhi. Akibatnya, dalam LHP BPK pada 2018 terdapat ketidaksesuaian spesifikasi barang atas enam paket pekerjaan pada tiga SKPA sebesar 28,85 M pada Dinas Kesehatan dan PUPR.

Aceh harus jadi perhatian kita semua. Darah, nyawa dan air mata sudah banyak tumpah dari rakyat Aceh untuk kemerdekaan Indonesia. Dan kini, kita harus lebih peduli dengan mereka. Sebab kita satu bangsa dan Tanah Air yang berada dalam naungan NKRI. 🇮🇩



## Terima Kasih Guru

**D**i Hari Guru ini, terbayang betapa sangat beratnya tugas guru mencerdaskan anak bangsa, di tengah jungkir baliknya moralitas dan remang-remangnya standar benar salah.

Para Guru menanamkan nilai kejujuran, tapi di saat yang sama kemenangan jadi tujuan utama. Tanpa peduli dilakukan dengan kecurangan dan menabrak nilai-nilai agama.

Para Guru mengajarkan konsep benar salah, namun di saat yang sama kita dipertontonkan wajah kebenaran yang samar-samar. Salah dan benar kian sulit ditentukan. Bersalin rupa sehingga membuat bingung.

Para Guru mendidik nilai keadilan, tapi di saat yang sama potret ketidakadilan ada dimana-mana.

Para Guru menanamkan kesantunan bahasa, namun di saat yang sama diksi-diksi kasar dan *verbal aggression* jadi menu sehari-hari.

Para Guru mengajarkan sikap hormat kepada orangtua dan ulama, tapi saat ini mereka yang harus dihormati justru jadi sasaran hinaan dan bahan lawakan.

Tapi, Para Guru tak peduli itu. Mereka terus berjuang. Mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan agar lahir generasi bertakwa dan cerdas untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik.

Semoga Allah SWT meridhoi perjuangan Para Guru dan memberikannya kemudahan dan pahala berlimpah pada Pahlawan tanpa tanda jasa.

Selamat Hari Guru.

Dari yang pernah dididik oleh para guru yang mulia. 🙏

## Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Karawang



barat sebuah bangunan, bangsa dan negara ini berukuran sangat besar dan luas. Ada sekira 17.504 pulau dan daratannya seluas 1.919.000 Km persegi, melebihi Eropa Barat.

Dengan besar dan luas semacam ini, dibutuhkan pilar-pilar yang kuat untuk menopang dan mengukuhkan bangunan bernama Indonesia. Agar tak roboh dan ambruk.

Itulah mengapa Empat Pilar MPR RI menjadi kebutuhan tak terekakkan. Keempat pilar tersebut yakni Pancasila,

UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Senin, 25 November lalu, saya sebagai Anggota MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dimaksud di Karawang, Jawa Barat. Saya mengajak masyarakat memegang teguh Empat Pilar tersebut. Sebab itu merupakan konsensus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar rakyat Indonesia hidup rukun dan damai meskipun berbeda-beda.

Memegang teguh dan mengamalkan empat pilar sangat penting di tengah dunia yang berubah cepat. Sebab, bangsa ini berpotensi kehilangan jatidirinya jika melupakan empat pilar tersebut.

Alhamdulillah, acara ini berlangsung sukses. Diikuti oleh unsur Muspida setempat dan sekira 150 orang dari berbagai kalangan.

Mari kita pegang teguh dan amalkan Empat Pilar MPR RI. 🍀

## Korupsi Musuh Kita Bersama

**H**ari ini, dunia memperingati Hari Anti Korupsi. Peringatan ini setelah Konvensi PBB mengeluarkan resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003 yang menetapkan 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Internasional. Majelis mendesak semua negara dan organisasi integrasi ekonomi regional yang kompeten untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB melawan Korupsi.

Sampai detik ini, korupsi masih menjadi masalah terbesar bangsa ini. Korupsi ibarat penyakit akut yang terus menggerogoti tubuh Ibu Pertiwi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2014-2019, jenis tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia didominasi perkara suap sebanyak 65 persen.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, kasus korupsi yang ada di Indonesia didominasi perkara penyuapan sebanyak 602 perkara penyuapan. Posisi kedua pengadaan barang dan jasa sebanyak 21 persen atau 195 perkara. Ketiga disusul oleh tindak pidana penyalahgunaan anggaran sebesar lima persen atau 47 perkara.



Selama periode 2014-2019, ada sejumlah pejabat negara yang menjadi tersangka korupsi. Sebagian bahkan sudah divonis penjara oleh Pengadilan Tipikor. Mulai dari pimpinan DPR, hingga dua orang menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat ini, telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Belum lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan kepala daerah, dari gubernur hingga bupati dan walikota.

Tak heran jika skor Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia pada 2018 masih berkutat pada 38. Temuan ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII). Skor 0 menunjukkan sangat korup, sedangkan 100

bersih dari korupsi. Skor Indonesia sama dengan tiga negara lainnya, yakni Bosnia Herzegovina, Srilanka, dan Swiss. Indonesia menempati urutan keempat di ASEAN, di bawah Malaysia.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyatakan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia seharusnya sudah di atas 50 poin, jika melihat usia bangsa yang telah merdeka selama 74 tahun.

Itulah sebabnya, PKS berharap agar lembaga anti rasuah KPK tidak bersifat *ad-hock* tetapi menjadi lembaga tetap dalam struktur kenegaraan yang lebih ajeg.

Bila kita melihat para pendahulu kita, orang-orang tua kita, sesungguhnya pencegahan korupsi yang paling efektif dimulai dari diri dan keluarga. Ketika diri mampu mengendalikan nafsu, ketika keluarga tidak menuhankan hedonisme, insya Allah akan terhindar dari perilaku koruptif.

Pantaslah seorang sahabat perempuan Rasulullah SAW saat mengantarkan suaminya pergi ke tempat kerja, ia membisikkan di telinga suaminya "Janganlah beri makan kami kecuali yang halal. Sesungguhnya kami mampu bersabar menahan lapar sepanjang hari tetapi kami tidak akan pernah sanggup hidup di atas api neraka walaupun hanya sejenak".

Semoga Allah hindarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita dari perilaku koruptif. Amin. 🌱

## Perlukah Haluan Negara Dihidupkan?

Ahad (8/12), saya mengikuti seminar internal Badan Pengkajian (BP) MPR RI di Yogyakarta. Temanya tentang perlu tidaknya menghidupkan Haluan Negara.

Alhamdulillah, dalam acara tersebut, saya dan anggota MPR RI lainnya banyak mendapatkan pencerahan dari para narasumber, yaitu Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (Peneliti dari LIPI), Prof. Dr. H. Ravik Marsudi, MS (Guru Besar Universitas Sebelas Maret) dan Prof. Dr. Kaelan, MS (Guru Besar Universitas Gajah Mada).

Pada prinsipnya, Para Guru Besar sepakat tentang perlunya Haluan Negara. Hal itu agar perjalanan pembangunan bangsa ini lebih terarah. Saat ini memang sudah ada UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga UU nomor 7 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Namun, implementasi di lapangan masih sulit untuk mensinkronkan kegiatan dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya. Sehingga tidak sustainable (berkelanjutan). Belum lagi mensinkronkan kegiatan pusat dan daerah. Di sinilah diperlukan Haluan Negara yang memberikan



arah, untuk dijadikan pegangan bagi seluruh stakeholder pembangunan.

Beberapa negara yang telah memiliki Haluan Negara antara lain Pakistan, Nepal, Afrika Selatan, Belgia, Thailand, dan Selandia Baru.

Pada saat Orde Baru, Indonesia juga pernah memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara atau yang biasa disingkat dengan GBHN. Isinya antara lain memuat kebijakan pembangunan yang disebut Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan, stabilitas dan pertumbuhan.

Pada saat Reformasi terjadi perubahan pada lembaga-lembaga negara khususnya MPR. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi tetapi hanya sebagai lembaga tinggi seperti Presiden, DPR, DPD dan lembaga tinggi lainnya. Di

samping itu, MPR juga tidak berkewajiban membuat GBHN.

Masalahnya sekarang, saat akan menghidupkan kembali Haluan Negara, produk hukum apa yang paling tepat untuk itu? Apakah Tap MPR ataukah cukup dengan Undang-Undang?

Soal ini perlu kajian lebih mendalam dari semua pemangku kepentingan. Tujuannya, agar langkah menghidupkan GBHN memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat.

Kita tentunya berharap, jika pada akhirnya GBHN dihidupkan, maka siapapun pemimpin bangsa harus patuh dan taat pada GBHN. Tidak boleh melenceng, apalagi melanggar. Dan tugas saya dan kita semua untuk mengawal, agar GBHN kelak tak cuma rangkaian kata-kata indah tak bermakna. 🗳️



**Kita tentunya berharap, jika pada akhirnya GBHN dihidupkan, maka siapapun pemimpin bangsa harus patuh dan taat pada GBHN. Tidak boleh melenceng, apalagi melanggar. Dan tugas saya dan kita semua untuk mengawal, agar GBHN kelak tak cuma rangkaian kata-kata indah tak bermakna.**

## Gowes Asyik Sabilulungan: Satu Sepeda Sejuta Sahabat



Setelah lebih dari setahun vakum, Alhamdulillah Gowes Asyik Sabilulungan kembali geliatnya. Kali ini mengadakan Gowes Bareng dari Danau Cibeurum Grand Wisata, Kabupaten Bekasi menuju Tugu Proklamasi Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (14/12/2019).

Pendaftaran peserta dilakukan melalui komunitas-komunitas sepeda. Awalnya, panitia hanya menyediakan untuk 450 Goweser. Namun antusiasme Goweser luar

biasa. Hingga akhirnya ada tambahan peserta lebih dari 500 an. Mereka berasal dari sekitar 30 komunitas sepeda.

Rombongan Goweser saya lepas dari Cibeureum pada pukul 07.00 WIB. Perjalanan berjalan lancar sampai bertemu perlintasan kereta api di daerah Perumahan Kompas, Tambun Selatan. Suasana agak tak teratur (*crowded*). Sebabnya ada enam kereta api yang melintas dalam waktu yang relatif pendek, sehingga pintu perlintasan selalu tertutup. Para Goweser tertahan sekitar seperempat jam. Setelah lolos dari kemacetan, kami bergerak menuju ke arah Tambelang.

Sekitar pukul 10.00 WIB kami tiba di pitstop atau tempat pemberhentian di Perumahan Mustika Regency Sukatani Bekasi. Di sini, Para Goweser menikmati roti dan air putih yang disediakan oleh pihak pengembang. Ada goweser yang ditawarkan rumah, bahkan ada juga Goweser yang bertanya terkait rumah di Mustika Regency ini.

Setelah beristirahat dan berfoto-foto, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju Tugu Proklamasi Rengasdengklok.

Menjelang sampai di lokasi, Para Goweser harus melewati sungai Citarum dengan menggunakan perahu, karena jembatan Karawang - Bekasi sampai saat ini masih dalam proses pembangunan. Kami harus ekstra hati-hati menyeberang sungai menggunakan perahu yang cukup untuk mengangkut dua mobil kecil ini. Karena kondisinya licin dan sempit.

Selesai menyeberang, kami terus mengayuh sepeda. Sekitar satu kilometer, Para Goweser akhirnya tiba di Tugu Proklamasi Rengasdengklok.

Alhamdulillah, tak ada peserta yang dievakuasi saat sampai di garis finis. Hanya ada insiden sedikit, seorang Goweser terjatuh di jalan dan satu goweser jatuh di tempat pitstop saat akan berhenti. Tapi bersyukur, tidak mengalami cedera.

Track atau jalur Cibeureum - Rengasdengklok memang relatif datar dan tanpa tantangan naik dan turun. Namun, ada sebagian jalan yang retak dan terbelah sehingga membahayakan bagi pesepeda. Ditambah lagi udara panas yang cukup menyengat, membuat Para Goweser cepat lelah.

Selama perjalanan, rombongan dikawal oleh mobil ambulans dari RS Ananda Bekasi. Fasilitas mobil ambulan lengkap karena ada dokter dan perawat.

Di tugu bersejarah, di mana Sang Proklamator Bung Karno pernah diculik dan diasingkan di tempat ini, para peserta menikmati makan siang, berfoto selfi dan menerima hadiah doorprize yang disediakan oleh panitia.

Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam Gowes Asyik Sabilulungan. Semoga kebersamaan ini akan terus bisa dilanjutkan pada masa-masa yang akan datang, sesuai tag line kita: Satu Sepeda Sejuta Sahabat. 🍀

# Menyerap Aspirasi Masyarakat Terkait Penataan Kelembagaan MPR



Sebuah tugas konstitusional saya lakukan. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menugaskan saya untuk menyerap Aspirasi Masyarakat terkait Penataan Kelembagaan MPR RI, pekan ini.

Amanah tersebut saya lakoni seoptimal mungkin. Caranya, saya mengumpulkan elemen perempuan jaringan saya dari seluruh Jawa Barat. Saya merasa penting mengumpulkan mereka, sebab perempuan memiliki peran vital dalam menyebarkan informasi kepada banyak pihak. Dari anak, suami, saudara hingga karib kerabat.

Di sisi lain, dengan alokasi perempuan sebesar 30% dalam daftar Calon Anggota Dewan (CAD) di pemilu, menunjukkan posisi perempuan dalam politik tak bisa lagi dipinggirkan. Mereka sudah masuk dalam pusaran politik sehingga harus mendapat banyak informasi terkait kelembagaan negara.

Kita mengetahui bahwa MPR sebagai sebuah lembaga pada era Reformasi mengalami perubahan, sejalan dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu ditunjukkan dengan kewenangan MPR dalam memilih presiden. Dulu, MPR berwenang memilih pemimpin negeri. Paska amandemen, kewenangan tersebut diserahkan langsung kepada rakyat.

Dulu MPR membuat Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sekarang amanah tersebut tak lagi dimiliki MPR. Dulu MPR merupakan lembaga tertinggi negara, sekarang hanya sebagai lembaga tinggi negara, sama halnya dengan DPR dan Presiden.

Melalui Aspirasi Masyarakat ini, saya ingin menyerap

bagaimana sesungguhnya keinginan masyarakat terhadap kelembagaan MPR pada masa-masa yang akan datang. Ini penting, karena dengan mendengar langsung aspirasi yang berkembang, akan diketahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk menata kelembagaan MPR menjadi lebih baik lagi.

Jika Anda punya gagasan brilian terkait kelembagaan MPR, silakan sampaikan kepada saya; bisa melalui lisan atau tulisan baik melalui email maupun media sosial saya. Terima kasih. 🙏

## Dilema Kartu Sehat di Kota Bekasi



**K**artu Sehat berbasis NIK (KS) memang semacam kartu Kajaib yang banyak memberikan solusi pada situasi yang sulit saat seseorang menderita sakit.

Pada awal peluncuran 2017 Jelang Pilkada 2018 dengan tanpa seleksi semua warga dapat menggunakan kartu ini

walaupun warga telah mempunyai BPJS (kecuali BPJS-PBI). Serta bisa langsung ke RSUD maupun RS swasta yg bekerja sama tanpa rujukan.

Ibarat asuransi unlimited, tentu saja KS berkosekuensi memerlukan penyiapan dana yang besar. Jika pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan, tanpa mengorbankan sektor kehidupan masyarakat lainnya, tidak masalah untuk membiayai kesehatan warganya sendiri.

Di samping kemampuan keuangan daerah, tentu saja kesesuaian dengan aturan dari pemerintah pusat juga harus dijadikan pegangan karena kita hidup di NKRI. Pemerintah pusat menghendaki layanan kesehatan di daerah diintegrasikan dengan program JKN yang berlaku secara nasional.

Itulah sebabnya, dalam pembahasan LKPJ 2018, Pansus LKPJ yang diketuai oleh Saudara Daryanto dari partai Golkar mengeluarkan rekomendasi agar KS diintegrasikan dengan program JKN. Memang pada saat itu yang membacakan laporan akhir pansus adalah Saudara Choiruman dari PKS atas permintaan pimpinan Sidang Paripurna saat itu.

Adalah sebuah kesalahan saat kisruh kartu sehat semua kesalahan dialamatkan kepada ketua DPRD dari PKS. Sebagai orang yang pernah membidani lahirnya Kartu Bekasi Sehat (KBS) sebelum lahirnya KS, tentu saja tidak logis kalau PKS menolak pemberlakuan KS, JUSTRU dulu

saya yang menginisiasi lahirnya KBS. Hanya saja, secara normatif tetap harus sejalan dengan berbagai aturan perundangan yang ada. Itulah yang diinginkan oleh PKS.

Di sisi lain, menjadi semakin aneh jika PKS jadi pihak yang disalahkan. Apalagi Ketua DPRD juga telah menyetujui pengesahan APBD 2020 yang di antaranya adalah persetujuan dilanjutkannya program kartu sehat dengan anggaran hampir Rp. 400 miliar, Jadi tidak dihentikan.

Dengan adanya demo dari berbagai pihak, termasuk para TKK yang terkesan dimobilisasi, yang menimpakan kesalahan kekisruhan KS ini pada kader PKS yang tengah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, menurut saya ini adalah salah alamat. Kisruh sebenarnya adalah masalah kesesuaian aturan yang belum sesuai antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.



**Jika PKS terus dipersalahkan, maka saya sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat akan memerintahkan kepada DPD PKS dan Fraksi PKS untuk mengambil sikap dan *positioning* yang tegas dalam kisruh KS ini.**

Jika PKS terus dipersalahkan, maka saya sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat akan memerintahkan kepada DPD PKS dan Fraksi PKS untuk mengambil sikap dan *positioning* yang tegas dalam kisruh KS ini.

Jangan sampai kisruh Kartu Sehat menjadi ajang politik yang tak sehat dan menggiring publik tak berakal sehat.

Semoga semua pihak dapat berfikir secara jernih dan mencari solusi dari permasalahan ini.

Komitmen kami Partai Keadilan Sejahtera, Layanan kesehatan terbaik untuk Warga Bekasi harus terus kita Perjuangkan! 🗳️





atau batas akhir kepada pihak maskapai untuk memberikan santunan kepada Ahli Waris," anggota Komisi V itu, Selasa (5/11).

Untuk itu, Syaikhul mendesak pemerintah untuk merevisi Permenhub tersebut. Dia mengusulkan agar ada klausul memberikan batas waktu selama tiga bulan dan menetapkan sanksi keterlambatan kepada pihak pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara. Diharapkan revisi tersebut dapat menyelesaikan kewajiban pihak pengangkut sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

"Saya melihat revisi ini sudah mendesak. Harus ada batas waktu paling lambat tiga bulan agar ke depan masalah

ini tidak terulang," tegas Cawagub DKI Jakarta itu.

Revisi ini perlu, menurut Syaikhul, karena isi Permenhub sudah cukup bagus. Dalam Pasal 2 misalnya, disebutkan pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka.

Sementara Pasal 3 Huruf a menyatakan: Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang.

Pihak Lion Air sendiri telah menyanggupi untuk memberikan kompensasi sebesar Rp.1.300.000.000,- dan hingga saat ini telah diberikan kepada 75 keluarga ahli waris dari total dari 189 korban tewas pesawat tersebut. Sedangkan pihak Boeing sendiri memberikan ganti rugi yang bersifat sukarela, yaitu sekitar Rp.1.600.000.000,- dan sampai saat ini baru 25 keluarga yang menerima kompensasi tersebut, dan 40 keluarga lainnya dalam proses pembayaran.

Selain soal tidak ada batasan waktu, belum selesainya kompensasi yang wajib diberikan oleh pihak Lion Air kepada pihak keluarga juga disebabkan adanya beberapa keluarga ahli waris yang menolak untuk menandatangani dokumen Release and Discharge. Dokumen tersebut mewajibkan keluarga ahli

waris melepaskan hak menuntut kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan. Padahal, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur mengenai kewajiban ahli waris mengenai hal ini.

Sebaliknya Permenhub 77/2011, pasal 23 menyatakan: Besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah NKRI atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, para ahli waris diberi kebebasan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk menuntut ke pengadilan apabila ganti rugi tersebut dirasa belum memenuhi rasa keadilan. Selain masalah tersebut, belum diaturnya batas waktu dan tidak adanya sanksi keterlambatan bagi penyelesaian kompensasi ini menyebabkan lambatnya pemberian kompensasi tersebut.

Di luar soal batas waktu, Syaikhmu melihat ada tiga hal lain yang mendesak dilakukan pihak-pihak terkait agar masalah ini tuntas. Pertama, mendesak pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara untuk memberikan peringatan kepada pihak Lion Air untuk segera menyelesaikan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa meminta syarat apapun kepada ahli waris.



The image shows a screenshot of a news article from the website merdeka.com. The article title is "Permenhub 77 Tahun 2011 Didesak Direvisi, Atur Batas Waktu Santunan Korban Kecelakaan". The author is Ahmad Syaikhmu, and the date is 5 November 2019. The article discusses the need to revise the 2011 regulation regarding compensation for accident victims, specifically focusing on the lack of a time limit for compensation.

Kedua, mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan pelarangan terbang pesawat Boeing 737 MAX sampai semua rekomendasi dari KNKT telah dijalankan dan seluruh kompensasi diberikan kepada ahli waris. Ketiga, mendesak Lion Air agar aktif melayani keluarga ahli waris dengan cara membantu mendaftarkannya kepada Boeing agar segera mendapatkan juga kompensasi.

"Kita berharap semua pihak beritikad baik agar hak-hak para ahli waris terpenuhi," demikian Ahmad Syaikhmu yang merupakan Legislator dari Dapil 7 Jawa Barat (Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta). •

## Permenhub 77 Tahun 2011 Didesak Direvisi, Atur Batas Waktu Santunan Korban Kecelakaan

Selasa, 5 November 2019 12:10

Reporter: Sania Mashabi

KANTOR BERITA POLITIK **RMOL.ID** REPUBLIK MERDEKA

HOME INDEKS NUSANTARA DUNIA POLITIK HUKUM KEAMANAN EKIBS OLAH-RAGA SERAK BOLA, BUTZ KE

Home > Politik

### Santunan Korban Lion Air JT 610 Belum Beres, Ahmad Syaikhul Desak Permenhub 77/2011 Direvisi

SELASA, 05 NOVEMBER 2019, 12:09 WIB  
LAPORAN: BUSLAN TAMBAK

223 Share

Ahmad SyaikhulNet

**RMOL.ID** Ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 di Perairan Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2018 belum semuanya mendapatkan santunan.

**Merdeka.com** - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhul, mendesak dilakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Hal ini berkaitan dengan belum selesainya pembayaran uang santunan terhadap korban Pesawat Lion Air JT 610.

"Ada celah dalam Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 karena tidak adanya tenggat waktu atau batas akhir kepada pihak maskapai untuk memberikan santunan kepada ahli Waris," kata Syaikhul pada wartawan, Selasa (5/11).

Syaikhul ingin, dalam revisi Permenhub tersebut, memberikan batas waktu selama tiga bulan untuk segera mengeluarkan santunan. Serta menetapkan sanksi keterlambatan kepada perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara.

"Saya melihat revisi ini sudah mendesak. Harus ada batas waktu paling lambat tiga bulan agar ke depan masalah ini tidak terulang," ungkapnya.

Menurutnya, saat ini pihak Lion Air belum melunasi kompensasi pada korban pesawat JT 610. Maka dari itu diperlukan batas waktu pembayaran kompensasi.

Selain itu, tambahnya, ada tiga hal mendesak dilakukan pihak-pihak terkait agar masalah ini tuntas. Mulai dari mendesak Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara untuk memberikan peringatan kepada pihak Lion Air untuk segera menyelesaikan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku tanpa meminta syarat apapun kepada Ahli Waris.

Kemudian, mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan pelarangan terbang pesawat JT 610 sampai semua rekomendasi dari KNKT telah dijalankan dan seluruh kompensasi diberikan kepada para ahli waris.

Terakhir, mendesak maskapai Lion Air agar aktif melayani keluarga Ahli Waris dengan cara membantu mendaftarkannya kepada Boeing agar segera mendapatkan juga kompensasi dari Boeing.

### **Syarat dari Lion Air untuk Keluarga Korban**

Gabungan keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 PK-LQP mengadukan maskapai Lion Air kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mengeluhkan syarat yang diberikan oleh pihak maskapai jika ingin asuransi atau uang santunan korban cair.

"Sampai saat ini pihak Lion Air memberatkan beberapa syarat kepada keluarga korban," kata Inchy Ayorbaya yang merupakan istri dari korban bernama Paul Ayorbaya saat dijumpai dalam aksi penyampaian aspirasi di depan istana merdeka, Jakarta, Kamis (13/12).

Hal tersebut dinilai tidak sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara.

"Sesuai dengan peraturan, itu sudah jadi hak kami tanpa embel-embel kami tidak boleh begini kami tidak boleh begitu. Dikasih kompensasi tidak seberapa, sudah tutup buku. Padahal keluarga ingin tahu lebih lanjut," ujarnya.

Adapun syarat yang diajukan oleh pihak maskapai adalah pihak keluarga tidak berhak menuntut Lion Air, Boeing dan anak usaha mereka yang berjumlah hampir 200 perusahaan jika sudah menerima uang kompensasi tersebut.

Akibatnya, banyak keluarga yang sampai saat ini masih belum memperoleh kompensasi tersebut sebab keberatan dengan syarat yang diajukan. [lia]



## Syaikh Dukung Aturan Calon Kepala Daerah Tak Boleh Zina

Yustinus Paat / JEM Senin, 14 Oktober 2019 | 13:17 WIB

**Jakarta, Beritasatu.com** - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhul, mendukung rencana revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 4 tentang tambahan syarat calon kepala daerah tidak boleh pernah melakukan perbuatan pidana di antaranya judi, mabuk, pengguna dan pengedar narkoba, hingga berzina.

"Saya lihat rencana ini lahirkan pro dan kontra. Tapi wacana revisi ini justru harus didukung penuh oleh semua pihak karena memberikan keuntungan bagi masyarakat. Saya mendukung rencana revisi ini," kata Syaikhul di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Menurut Ketua DPW PKS Jawa Barat ini, setidaknya ada beberapa alasan kuat yang mendorong dirinya mendukung wacana revisi PKPU tersebut.

"Pertama, negara kita berdasarkan Pancasila. Sila Pertama berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, nilai-nilai agama jadi landasan kita. Semua agama pastinya tidak membolehkan pengikutnya berbuat amoral seperti berzina dan mabuk," terangnya.

Kedua, menurut Syaikhul, setiap perhelatan pilkada selalu menghabiskan banyak uang. Tahun 2018 lalu saat pilkada serentak dilaksanakan, dana yang dibutuhkan sebanyak Rp 20 triliun. "Sangat menyedihkan jika dengan anggaran sebesar itu tapi tidak melahirkan pemimpin terbaik yang bermoral," tandasnya.

Ketiga, menurut Syaikhul, rakyat berhak mendapatkan pemimpin terbaik

tanpa cacat. Pemimpin, kata dia, harus menjadi panutan atau teladan dan mampu membawa kemaslahatan.

"Kelima, dalam Islam, minuman keras atau khamr disebut sebagai ummul khobaits atau induk dari keburukan. Pemimpin yang suka mabuk akan sangat mudah melakukan tindakan kejahatan lainnya," jelas dia.

Dalam pandangan Syaikh, perilaku buruk pemimpin hanya akan membuat dirinya tersandera, sehingga tak bisa maksimal dalam menjalankan amanah sebagai pejabat publik.

"Tinggal nantinya semua pihak duduk bersama, mendapatkan parameter atau alat ukur yang jelas tentang zina dan mabuk tersebut sehingga dapat diterima pihak yang kontra," tutup Syaikh.



## Ahmad Syaikh Ajak Aleg PKS Bentuk Desa Binaan

**BEKASI, DAKTA.COM** - Anggota DPR RI Ahmad Syaikh mengajak seluruh Anggota Legislatif (aleg) DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta membuat Desa Binaan.

Hal itu Ahmad Syaikh sampaikan saat melakukan kunjungan di tiga wilayah tersebut yang merupakan daerah pilihannya, yakni Dapil 7 Jawa Barat, Sabtu (26/10/2019).

"Ini tanggungjawab kita dari PKS untuk memelihara konstituen yang ada," ujar Cawagub DKI Jakarta itu.

Syaikh melanjutkan, program Desa Binaan juga respons dari harapan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Mohamad Sohibil Iman. Keduanya meminta kepada aleg terpilih untuk membuat desa-desa binaan di dapilnya.

"Ini respons atas harapan Habib Salim dan Pak Sohibil Iman," ungkap Ketua DPW PKS Jawa Barat itu.

Syaikhu berharap, usai pertemuan para anggota legislatif melakukan survei desa mana saja yang bakal menjadi proyek percontohan. Desa Binaan tersebut harus mempertimbangkan potensi daerah.

"Potensi ini juga nantinya harus juga dipadukan dengan pangsa pasarnya, yaitu kaitan dengan pemasaran yang ada di daerah masing-masing. Agar perekonomian di desa tersebut dapat berjalan," jelasnya.

Untuk mewujudkan desa binaan, tidak menutup kemungkinan akan bekerjasama dengan pihak lain seperti BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta melalui bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) nya.

"Kalau konsepnya jelas, pemberdayaan ekonominya jelas, pemberdayaan lingkungannya jelas, saya yakin kita akan disupport oleh berbagai pihak," ujar Syaikhu.

The screenshot shows a news article on the Yahoo! Indonesia website. The article title is "DPR dorong Balai Diklat BPK cetak SDM pemeriksa berkualitas". The author is Agus Kallio, dated 4 November 2019. The article features a photograph of four men in batik uniforms, with Agus Kallio on the right. A Yahoo! banner at the top of the article reads "SPEND LESS TIME SEARCHING. MORE TIME CHILLING. Get the app!". Below the photo, there is a caption in Indonesian: "Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu mendorong Balai Diklat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencetak sumber daya manusia (SDM) pemeriksa berkualitas." and a quote: "Pemberdayaan Balai Diklat BPK ini sangat strategis karena dapat mencetak SDM pemeriksa yang berkualitas," kata Ahmad Syaikhu dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin.

## DPR Dorong Balai Diklat BPK Cetak SDM Pemeriksa Berkualitas

Senin, 4 November 2019 12:14 WIB

**Jakarta (ANTARA)** - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu mendorong Balai Diklat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencetak sumber daya manusia (SDM) pemeriksa berkualitas.

"Keberadaan Balai Diklat BPK ini sangat strategis karena dapat mencetak SDM pemeriksa yang berkualitas," kata Ahmad Syaikh dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin.

Ahmad Syaikh mengingatkan BPK juga sudah memiliki kualifikasi SDM pengajar dengan sertifikasi internasional dan sudah semakin mendapat kepercayaan dari sejumlah lembaga internasional seperti INTOSAI, ASOSAI dan ASEANSAI.

Dengan memberikan sentuhan tambahan pada kurikulum yang diperlukan oleh lembaga pemeriksa internasional, lanjutnya, maka Balai Diklat BPK bisa membuka kelas-kelas internasional.

Ahmad Syaikh telah melakukan kunjungan kerja ke Balai Diklat BPK RI di Denpasar, Bali. Politikus PKS itu datang ke Pulau Dewata bersama Pimpinan dan Anggota BAKN DPR lainnya dari Jum'at (1/11) sampai Minggu (3/11).

"Keunggulan Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas Balai Diklat BPK," jelas Syaikh.

Menurut dia, langkah tersebut bisa bekerja sama dengan banyak pihak, antara lain dengan memanfaatkan hotel-hotel yang ada di Bali.

Selain itu, lanjutnya, pendanaan juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti USAid dan Bank Dunia.

Ia berpendapat bahwa dengan terobosan seperti ini maka penyediaan SDM pemeriksa yang berkualitas akan semakin cepat, daripada sekadar menunggu turunnya anggaran dari APBN.

Balai Diklat BPK RI, yang bertujuan mencetak SDM pemeriksa dari dalam dan luar negeri, baru diresmikan Oktober 2019. Balai tersebut memiliki luas 5.000

The screenshot shows a news article on the SINDOnews.com website. The article is titled "Diklat BPK Dinilai Penting untuk Cetak SDM Pemeriksa Berkualitas" (Diklat BPK is Considered Important for Creating Quality Examination Personnel). The author is Muhammad Fajardin, and it was published on November 4, 2019, at 11:31 WIB. The article features a photograph of the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) building. The article text states that the Diklat BPK is a training program for the BPK, aimed at creating quality examination personnel. It mentions that the training is being held in Bali and is being supported by the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) and the Badan Daya Manusia (SDM) Pemeriksa Berkualitas. The article also mentions that the training is being held in Bali and is being supported by the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) and the Badan Daya Manusia (SDM) Pemeriksa Berkualitas.

**SINDOnews.com**  
Sumber Informasi Terpercaya

Home Politik Hukum Hankam Humaniora Edukasi Indeks

14 Diklat BPK - Uluwatu Rp 2.1 JT  
15 Diklat BPK - Uluwatu Rp 4.9 JT

home > Hukum

**Diklat BPK Dinilai Penting untuk Cetak SDM Pemeriksa Berkualitas**

Muhammad Fajardin  
Senin, 4 November 2019 - 11:31 WIB

**Shopee**  
12 PROMO  
12.12  
MIDNIGHT CASHBACK  
120%  
UNTUK BELANJA  
Sesuai Peringkat

**Badan Pemeriksa Keuangan**

Muhammad Fajardin  
Reportase

Putusan MA, Kasus Hukum Percepatan Slip Bantu Konsumen GRC  
Lewat Jalan Sebel, Pano Bakti Hestanti

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Ahmad Syaikh mendorong Balai Diklat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksa berkualitas. (Foto:Bankard/SINDOnews)

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Ahmad Syaikh mendorong Balai Diklat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) pemeriksa berkualitas.

meter persegi, dan melayani 40 orang peserta dengan dua ruang kelas dan 23 kamar mess.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna akan mendorong pengetatan prosedur pemeriksaan meski laporan keuangan pemerintah pusat sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

"Kami akan ada pemeriksaan yang lebih ketat tahun ini, sesuai dengan standar keuangan negara," ujar Agung usai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua BPK di Jakarta, Kamis (24/10).

Ia mengatakan upaya pengetatan pemeriksaan itu akan disertai dengan budaya akuntabilitas yang sejalan dengan tata kelola untuk mengurangi perilaku korupsi.

Agung mengatakan saat ini masih terdapat persoalan dalam pengelolaan keuangan negara salah satunya terkait revaluasi aset barang milik negara.

"Revaluasi aset pemerintah masih menyisakan persoalan cukup banyak. Pemerintah perlu merapikan tata kelola aset, karena ada masalah keberadaan, kepemilikan dan keperuntukkan," ujarnya.

**BAKN Soroti SILPA Aceh Sebesar Rp 1 Triliun**  
21-11-2019 / BAKN.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu.  
Foto: Nadya/ra

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu, menyoroti peran Pemerintah Provinsi Aceh dalam merencanakan program Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya...

## BAKN Soroti SILPA Aceh Sebesar Rp 1 Triliun

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu, menyoroti peran Pemerintah Provinsi Aceh dalam merencanakan program Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya, sehingga menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) hampir Rp 1 triliun pada tahun 2017 yang mengendap di kas daerah.

"Saya meminta Pemerintah Aceh untuk memperbaiki pelaksanaan penyerapan DOKA ini. Jangan sampai, terjadi seperti tahun 2017 di mana penyerapan DOKA tidak optimal yang hampir Rp 1 triliun menjadi SILPA. Hal ini sangat disayangkan karena akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Aceh," katanya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan Sekretaris Daerah Aceh beserta jajaran, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (20/11/2019).

Syaikhu menjelaskan, Provinsi Aceh sendiri telah menerima kucuran DOKA sejak tahun 2008. Secara kumulatif sampai dengan tahun 2019 DOKA yang telah dikucurkan berjumlah Rp 73,3 triliun. DOKA digunakan untuk membantu Pemerintah Aceh dalam upaya pembiayaan pembangunan dan pemerliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan masyarakat Aceh pasca konflik dan bencana.

Menurut politisi Fraksi PKS ini, realisasi DOKA yang baru dilakukan menjelang akhir tahun dapat menyulitkan dalam penyediaan barang dan jasa. Hal ini terbukti dengan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan barang dengan spesifikasi tertentu yang sulit dipenuhi.

"Saya melihat inilah ke depan yang harus direncanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pemprov Aceh, sehingga program otonomi khusus ini terencana dengan baik, pelaksanaannya juga sedemikian baik. Insya Allah dana yang besar ini akan mampu kemudian mengefektifkan untuk kaitan peningkatan pemberdayaan ekonomi yang diharapkan, di samping meningkatkan kesejahteraan, bagi warga masyarakat Aceh," jelasnya.

DOKA untuk otonomi khusus saat ini mengalami break event, di mana menurut Syaikhu, Aceh pada tahun 2000 angka kemiskinan berada di 15 persen, kemudian meningkat hingga 32 persen karena konflik dan bencana alam, dan saat ini kembali di angka 15 persen. Oleh karenanya, ia mengimbau sampai akhir pendanaan DOKA di tahun 2027 nantinya, Pemprov Aceh harus mampu meningkatkan sesuai dengan perkembangan daerah dan provinsi lainnya.

"Itulah harapan kami, dan walaupun misalnya sampai dengan 2027 masih belum bisa terlaksana, maka Pemerintah Provinsi Aceh perlu membuat skema exit-nya seperti apa. Agar perkembangan ekonomi di Aceh tidak tertinggal jauh dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia," tutupnya sembari berharap pembahasan DOKA bagi Aceh perlu dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tentu saja bergantung pada keberlangsungan Aceh di masa mendatang. (ndy/es)

Bali memiliki keunggulan sebagai daerah kunjungan wisata internasional. Pada sisi lain, BPK RI juga sudah memiliki kualifikasi SDM pengajar dengan sertifikasi internasional dan sudah semakin mendapat kepercayaan dari INTOSAI, ASOSAI dan ASEANSI

**H. AHMAD SYAIKHU**  
Wakil Ketua Badan DPR RI

Jakarta (4/11) – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhul mendorong Balai Diklat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetak Sumber Daya



**BERITA FRAKSI PKS**  
Fraksi.pks.id | Senin 4 November 2019

Facebook PKS RI | Instagram | WhatsApp | Telegram



## Ahmad Syaikhul Dorong Balai Diklat BPK Cetak SDM Pemeriksa Berkualitas

Manusia (SDM) Pemeriksa berkualitas.  
Hal itu disampaikan Ahmad Syaikhul dalam kunjungan kerjanya ke Balai Diklat BPK RI di Denpasar, Bali. Politisi PKS itu datang ke Pulau Dewata bersama pimpinan dan anggota BAKN lainnya dari Jumat (1/11/2019) sampai Ahad (3/11/2019).

"Keberadaan Balai Diklat BPK ini sangat strategis karena dapat mencetak SDM Pemeriksa yang berkualitas," kata Syaikhul.

Dalam pandangan

Cawaguk DKI Jakarta itu, Bali memiliki keunggulan sebagai daerah kunjungan wisata internasional. Pada sisi lain, BPK RI juga sudah memiliki kualifikasi SDM pengajar dengan sertifikasi internasional dan sudah semakin mendapat kepercayaan dari INTOSAI, ASOSAI dan ASEANSI. Dengan memberikan sentuhan tambahan pada kurikulum yang diperlukan oleh lembaga pemeriksa internasional, maka Balai Diklat BPK bisa membuka kelas kelas internasional.

"Keunggulan Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas Balai Diklat BPK," jelas Syaikhul.

Menurut Syaikhul, langkah di atas bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Misal, dengan memanfaatkan hotel-hotel yang ada di Bali. Pendanaan juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti USAID, World Bank, dan sebagainya.

Dengan terdosen seperti ini lanjut Syaikhul, maka penyiapan SDM Pemeriksa yang



**H. AHMAD SYAIKHUL** saat kunjungan kerjanya ke Balai Diklat BPK RI di Denpasar, Bali, (1-3 November 2019).

berkualitas akan semakin cepat, daripada sekadar menunggu turnurnya anggaran dari APBN.

"Kita harus melakukan terobosan semacam ini. Jangan sampai hanya menunggu turnurnya APBN," tegas Syaikhul. Balai Diklat BPK RI baru direncanakan Oktober 2019. Keberadaannya diperuntukkan

untuk mencetak SDM Pemeriksa dari dalam dan luar negeri.

Saat ini Balai dengan luas 5.000 meter persegi ini baru bisa melayani 40 orang peserta dengan dua ruang kelas dan 23 kamar mes.

Balai Diklat BPK RI baru direncanakan Oktober 2019. Keberadaannya diperuntukkan

**BAKN**

Liputan Media | bpr.go.id | Jumat, 13 Desember 2019

Facebook PKS DPR RI | Instagram | WhatsApp | Telegram



Semua harus duduk bersama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga ke depan bisa dirumuskan lebih matang exit strategic apa yang diambil masing-masing daerah. Kalau memang harus diputus ini jadi pertimbangan, apa ke depan yang harus dilakukan,"

**H. AHMAD SYAIKHU**  
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI

Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, Papua Barat, Aceh, dan dana Keistimewaan Yogyakarta akan segera berakhir. Pemerintah daerah dan pusat perlu memikirkan strategi akhir (exit strategic) dari pengalokasian dana itu. Apakah perlu dihentikan atau dilanjutkan dengan konsentrasi khusus ke satu bidang pembangunan di empat provinsi tersebut.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

## Strategi Akhir Dana Otsus Harus Dipikirkan

(BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhul mengemukakan hal tersebut usai mengikuti pertemuan dengan para akademisi Universitas Udayana di Bali, Kamis (12/12/2019). "Karena dana ini tidak untuk selamanya, maka harus ada exit strategic. Harus dipersiapkan penyelesaiannya. Apa exit strategic yang akan dilakukan, apakah akan dievaluasi atau akan dihentikan," tukasnya.

Tim Kunjungan Kerja BAKN ke Kampus Udayana untuk menyerap pandangan atas pengalokasian dana Otsus dan keistimewaan yang selama ini digelontorkan bagi Papua, Papua Barat, Aceh, dan Yogyakarta. Menurut Syaikhul, perlu ada persiapan matang mengenai pengalokasian dana ini dari APBN. Misalnya, mungkin ke depan alokasi dana Otsus akan dikonsentrasikan saja untuk pendidikan, kesehatan, atau bidang lainnya agar lebih terarah.

"Semua harus duduk bersama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga ke

depan bisa dirumuskan lebih matang exit strategic apa yang diambil masing-masing daerah. Kalau memang harus diputus ini jadi pertimbangan, apa ke depan yang harus dilakukan," tutur politisi PKS ini. Ditambahkannya, dana Otsus dan keistimewaan ini harus memiliki master plan yang jelas, sehingga bisa terukur legislasi apa saja yang hendak dilakukan pemerintah.

Selanjut ini kita akan memberi masukan yang lebih dalam pada pemerintah atau kita dalam lagi dengan pemerintah. Mungkin juga pemerintah sudah merumuskan exit strategic-nya. Kita ingin tahu dulu apa yang akan dilakukan pemerintah terkait dana Otsus dan keistimewaan ini," tutup legislator dapil Jawa Barat VII itu. (m/s/sf)



## BERITA FRAKSI PKS

Fraksi.pks.id | Sabtu 26 Oktober 2019

Fraksi PKS DPR RI | @ahmadsyaiKHU | @ahmadpks | fraksi.pks.id



## Kunjungi Dapil, Ahmad Syaikhul Iman Ajak Aleg PKS Buat Desa Binaan

Jakarta (26/10) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul Iman mengajak seluruh Anggota Legislatif (aleg) DPRD Provinsi Jawa Barat,



Program desa binaan juga respons dari harapan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Sagaf Al Jufri dan Presiden PKS Sohibul Iman. Keduanya meminta kepada aleg terpilih untuk membuat desa-desa binaan di dapilnya.

AHMAD SYAIKHU

Dan Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta membuat desa binaan. Hal itu Ahmad Syaikhul Iman sampaikan saat melakukan kunjungan di tiga wilayah tersebut yang merupakan daerah pemilihannya, yakni Dapil 7 Jawa Barat, Sabtu (26/10). "Ini tanggungjawab kita dari PKS untuk memelihara konstitusi yang ada," ujar Cawagub DKI Jakarta itu.

Syaikhul melanjutkan, program desa binaan juga respons dari harapan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Sagaf Al Jufri dan Presiden PKS Sohibul Iman. Keduanya meminta kepada aleg terpilih untuk membuat desa-desa binaan di dapilnya.

"Ini respons atas harapan Habib Salim dan Pak Sohibul Iman," ungkap Ketua DPW PKS Jawa Barat itu.

Syaikhul berharap, usai

peraturan para anggota legislatif melakukan survei desa mana saja yang bakal menjadi proyek percontohan. Desa binaan tersebut harus mempertimbangkan potensi daerah.

"Potensi ini juga nantinya harus juga dipadukan dengan pengpa pasarnya, yaitu kaitan dengan pemersaran yang ada di daerah masing-masing. Agar pemersaran di desa tersebut dapat berjalan," jelasnya.

Untuk mewujudkan desa binaan, tidak menutup kemungkinan akan bekerjasama dengan pihak lain seperti BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta melalui bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) nya.

"Kalau konsepnya pilot, pemberdayaan ekonominya pilot, pemberdayaan lingkungannya jelas, saya yakin kita akan disupport oleh berbagai pihak," ujar Syaikhul.



"Saya melihat revisi ini sudah mendesak.

Harus ada batas waktu paling lambat 3 bulan agar ke depan masalah ini tidak terulang

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Majelis Syuro PKS

Jakarta (5/11) — Para Ahli Waris Korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 di Penairan Karawang, Jawa Barat belum semua mendapat santunan, dirangsang Anggota DPR Fraksi PKS Ahmad Syaikhul Iman.

Syaikhul meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 77 Tahun 2011.

Seperti diketahui, tragedi yang menewaskan 189 penumpang termasuk awak pesawat itu terjadi pada 29 Oktober 2018 lalu. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah menerbitkan laporan dengan sejumlah rekomendasi. Namun, di sisi lain, masalah kompensasi pihak Lion Air terhadap Para Ahli Waris korban belum juga dibicarakan.

Salah satu penyebabnya diduga karena Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang tak memberikan batas waktu kepada pihak pengangkut.

"Ada celan dalam Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 karena tidak adanya tenggat waktu atau batas akhir

### KOMISI V

Fraksi.pks.id | Sabtu 5 November 2019

Fraksi PKS DPR RI | @ahmadsyaiKHU | @ahmadpks | fraksi.pks.id



## SANTUNAN KORBAN LION AIR JT 610 BELUM TUNTAS

### DPR Desak Pemerintah Revisi Permenhub Nomor 77 Tahun 2011

kepada pihak maskapai untuk memberikan santunan kepada Ahli Waris," ujar Syaikhul yang diamanahkan PKS di Komisi V.

Untuk itu, Syaikhul mendesak pemerintah untuk merevisi Permenhub tersebut. Dia mengusulkan klausul untuk memberikan batas waktu 3 bulan dan menetapkan sanksi keterlambatan kepada pihak pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara.

"Saya melihat revisi ini sudah mendesak. Harus ada batas waktu paling lambat 3 bulan agar ke depan masalah ini tidak terulang," tegas Cawagub DKI Jakarta itu.

Revisi ini perlu, menurut Syaikhul, karena isi Permenhub sudah cukup bagus. Dalam Pasal 2 disebutkan Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian penumpang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka. Sementara Pasal 3 huruf a menyatakan Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada



hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp.25 M per penumpang.

Pihak Lion Air telah menyanggapi untuk memberikan kompensasi sebesar Rp.1,3 M dan hingga kini telah dibarkan kepada 75 keluarga ahli waris dari total dari 269 korban tewas pesawat tersebut. Sedangkan pihak Boeing memberi ganti rugi benefit sukawani, sekitar Rp.1,6 M, dengan 22 keluarga yang menerima kompensasi

dan 40 keluarga dalam proses pembayaran.

Selain soal tidak ada Batasan waktu, belum selesainya kompensasi juga karena adanya beberapa keluarga Ahli Waris yang menolak untuk menandatangani dokumen Release and Discharge. Dokumen tersebut menjelaskan keluarga Ahli Waris melepaskan hak menuntut pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan.

Sebaliknya Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011, pasal 23 menyatakan: Besarannya ganti kerugian yang tidak dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, Ahli Waris, penerima rima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri.

Artinya, Para Ahli Waris diberi kebebasan yang dijalin undang-undang untuk menuntut ke pengadilan, apabila ganti rugi tersebut dirasa belum memenuhi rasa keadilan. Selain masalah pihak Boeing ganti rugi tersebut, belum diaturnya batas waktu dan tidak adanya sanksi keterlambatan menjadi salah

suatu masalah tersendiri.

Di luar soal batas waktu, Syaikhul melihat ada tiga hal lain yang mendesak dilakukan pihak-pihak terkait agar masalah ini tuntas.

Pertama, mendesak Pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Udara untuk memberikan peringatan kepada pihak Lion Air, agar segera menyeteskan keselanjutannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memina sporan apapun kepada Ahli Waris.

Kedua, mendesak Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan pelarangan terbang pesawat Boeing 737 MAX sampai semua rekomendasi dari KNKT telah dipjalankan dan seluruh kompensasi dibarkan kepada Para Ahli Waris.

Ketiga, mendesak Lion Air agar aktif melatani keluarga Ahli Waris dengan cara membantu mendaftarkan kepada Boeing agar segera mendapatkan jasa kompensasi. "Kita berharap semua tersebut, belum diaturnya batas waktu dan tidak adanya sanksi keterlambatan menjadi salah satu

## HARI ASPIRASI



### Aspirasi Keluarga Korban Kecelakaan Lion Air

Anggota Komisi V DPR RI H. Ahmad Syaikhul menerima aspirasi dari keluarga korban kecelakaan Lion Air pada Jum'at 8 November 2019 di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI. Aspirasi terkait dengan pembayaran uang dari PT Lion air pada korban.

Foto : Erwinsyah / Humas FPKS